

**PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP PERUBAHAN
KEBIJAKAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL
DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI



Oleh :

FENNI RATNA DEWI

15323120

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

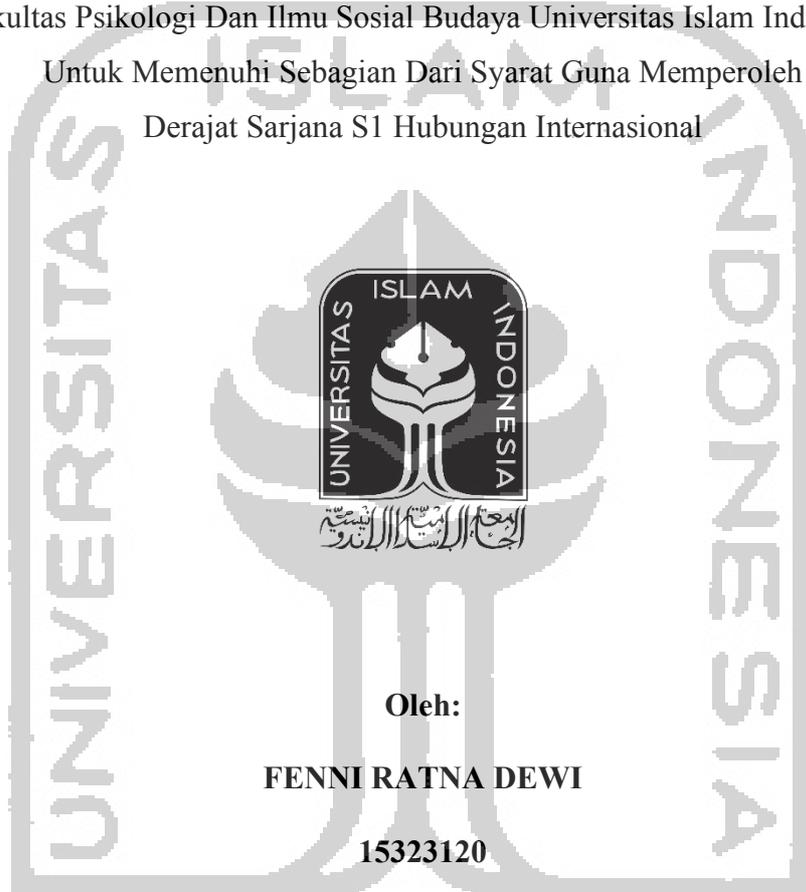
PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN

TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

FENNI RATNA DEWI

15323120

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP PERUBAHAN
KEBIJAKAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL
DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hubungan

Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 SEP 2019

Oleh:

FENNI RATNA DEWI

15323120

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

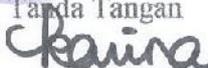


Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

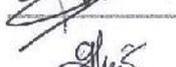
Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A
3. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A

Tanda Tangan







PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fenni Ratna Dewi

No. Mahasiswa : 15323120

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Pengaruh Gerakan #MeToo Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan Seksual Di Amerika Serikat Tahun 2017-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
1532312015AFF940470622
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fenni Ratna Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Signifikansi Penelitian	2
1.5. Cakupan Penelitian	2
1.6. Tinjauan Pustaka	2
1.7. Landasan Konseptual	2
1.8. Metode Penelitian	16
1.8.1. Jenis Penelitian.....	2
1.8.2. Subjek Penelitian.....	2
1.8.3. Alat Pengumpulan Data	2
1.8.4. Proses Penelitian	2
BAB II GERAKAN #METOO AMERIKA SERIKAT DAN AKTIVISME TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK	18

2.1. <i>Boomerang Pattern</i> Dalam Aktivisme Gerakan # <i>Metoo</i> di Amerika Serikat	19
2.2. <i>Political Entrepreneurs</i> dalam Aktivisme Gerakan # <i>MeToo</i> Amerika Serikat	30
2.3. <i>International Conference and Organizations</i> yang Mendukung Aktivisme Transnasional Gerakan # <i>MeToo</i> Amerika Serikat	39
BAB III TAKTIK GERAKAN #METOO AS DALAM MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERHADAP HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT	44
3.1. Taktik Gerakan # <i>Metoo</i> AS Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori <i>Transnational Advocacy Network</i>	2
3.1.1. <i>Information Politics</i>	46
3.1.2. <i>Symbolic Politics</i>	53
3.1.3. <i>Leverage Politics</i>	56
3.1.4. <i>Accountability Politics</i>	61
3.2. Hasil Pencapaian Gerakan # <i>MeToo</i> AS dalam Memengaruhi Kebijakan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja AS	64
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	2

ABSTRAK

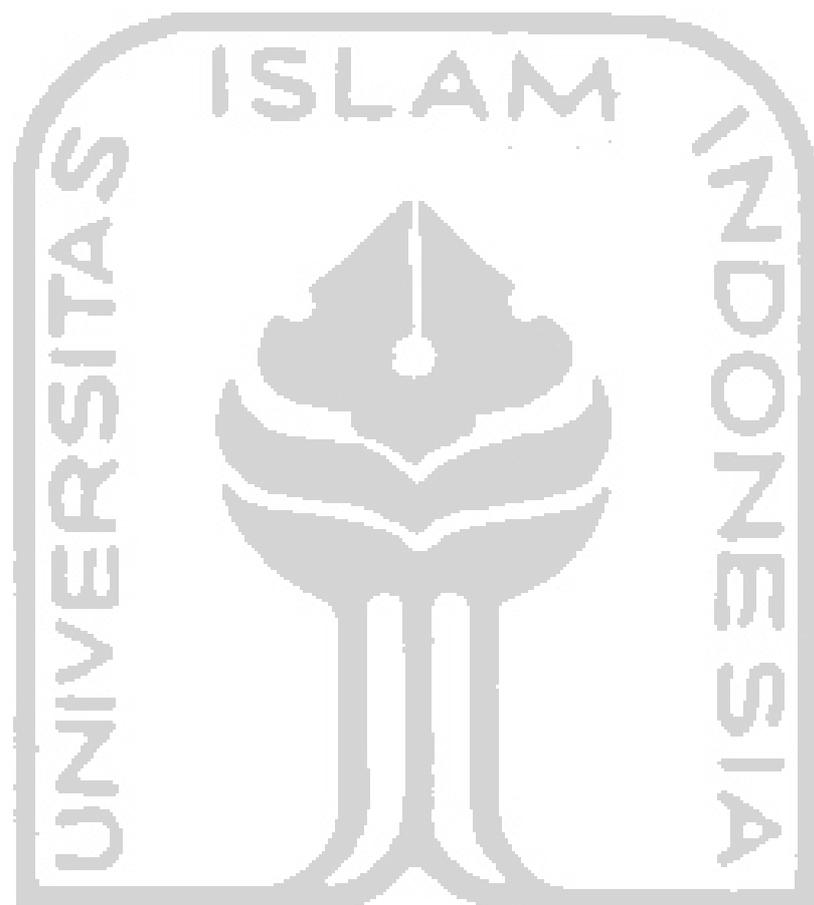
Meluasnya kesadaran global akan masalah pelecehan seksual di tempat kerja telah mendorong mobilisasi Gerakan #MeToo di berbagai negara. Gerakan #MeToo telah berdampak secara politik mempengaruhi beberapa negara untuk merespons masalah pelecehan seksual di dalam negerinya. Amerika Serikat sebagai titik awal di mana tagar #MeToo berasal telah menghadapi tuntutan besar dari gerakan untuk mereformasi sistem hukum yang menangani masalah ini. Memanfaatkan momentum #MeToo yang beresonansi secara global, aktivis Gerakan #MeToo AS berupaya memperluas dukungan internasional untuk menekan negaranya mereformasi hukum federal untuk merespons masalah tersebut. *Boomerang pattern* yang bergerak dalam kasus ini telah menciptakan efek tekanan bagi pemerintah AS. Skripsi ini mencoba menganalisa *Transnational Advocacy Network* dari Gerakan #MeToo melalui berbagai aktivisme gerakan yang berhubungan dengan aktor-aktor di luar negaranya untuk mencapai tujuannya. Dengan mengidentifikasi proses pembentukan gerakan dan taktik gerakan dalam upaya memengaruhi perilaku negara untuk merespons masalah yang diadvokasikan gerakan. Temuan dari penelitian ini telah menghasilkan pencapaian gerakan dalam mempengaruhi negara, khususnya pengaruh pada perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja.

Kata Kunci : *Boomerang pattern*, Gerakan #MeToo, Pelecehan seksual di tempat kerja, Reformasi legislative, *Transnational Advocacy Network*.

ABSTRACT

Widespread global awareness of the workplace sexual harassment problem has driven the mobilization of the #MeToo Movement in various countries. The #MeToo movement has politically affected several countries to respond the problem of sexual harassment within their country. The United States as a starting point where hashtag #MeToo originated has faced huge demands from the movement to reform the legal system that addresses this problem. Utilizing the #MeToo momentum that resonates globally, US #MeToo Movement activists are trying to expand international support to pressure their country to reform federal law as a respond to this problem. The boomerang pattern that prevailing in this case has created a pressure effect to the US government. This thesis attempts to analyze the Transnational Advocacy Network of the #MeToo Movement through various movement activism related to actors outside the country to achieve its goals. By identifying the process of forming the movement and tactics of the movement which an effort to influence the behavior of the state to respond the problem which advocated by the movement. The findings of this study has resulted the achievement of movements in influencing the state, specifically the influence on policy changes regarding sexual harassment in the workplace

Keywords: Boomerang pattern, #MeToo Movement, Workplace sexual harassment, Legislative reform, Transnational Advocacy Network.



جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perluasan isu melalui aktivisme media sosial merupakan fenomena global kontemporer yang umum terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya kampanye global melalui *hashtag* yang berkembang menjadi isu global saat ini yaitu fenomena meluasnya tagar *#MeToo* di seluruh dunia. Berawal pada tahun 2017 seorang aktris *Hollywood*, Alyssa Milano menggunakan *hashtag* *#MeToo* untuk mendapatkan dukungan atas cerita pribadinya tentang pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja (Garcia, 2017). Dengan kecepatan media sosial dan status Milano sebagai seorang selebriti, tagar menyebar secara global melalui respons orang-orang dari berbagai negara. Tagar *#MeToo* telah menjadi arus utama di media global dalam menyuarakan masalah pelecehan seksual di tempat kerja.

Disisi lain, praktik pelecehan seksual terutama di tempat kerja sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan seksual, dimana dalam sejarah hal ini telah mengakar dalam konteks perbudakan yang dialami oleh wanita (Siegel, 2003, p. 3). Konsep dan definisi pelecehan seksual pertama kali diperkenalkan oleh feminis AS pada pertengahan 1970-an, dimana Pengadilan AS adalah yang pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42).

Di Amerika Serikat, pengakuan atas klaim yang mengarah pada tindakan ini dimasukkan secara hukum pertama kali dimasukkan dalam Judul VII Undang-Undang Hak Sipil 1964 sebagai diskriminasi jenis kelamin (Siegel, 2003, p. 8). Istilah “pelecehan seksual” muncul pada diskusi yang diadakan Lin Farley pada tahun 1974 dalam kursus Universitas Cornell tentang wanita dan pekerjaan (Siegel, 2003, p. 8). Pada awal 1980-an, EEOC (*Equal Employment Opportunity*) mulai mengakui pelecehan seksual sebagai bagian dari larangan diskriminasi UU Hak Sipil tahun 1964 (EEOC, 2019). Sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS telah melalui beberapa pembaharuan sejak pertama kali dikeluarkan melalui *Title VII Civil Rights Act* 1964 tersebut dan diberlakukan hingga saat ini (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. , 2018).

Meskipun AS sendiri telah memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual, masalah ini masih memiliki prevalensi tinggi dialami masyarakat AS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif mencegah dan menangani pelecehan seksual di AS. Namun, masalah ini kurang diperhatikan oleh pemerintah AS sementara kesadaran masyarakat akan hal ini juga rendah. Akibatnya muncul seorang warga domestik memprovokasi masalah agar mendapatkan perhatian nasional.

Langkah yang dilakukan dengan menunjukkan masalah ini melalui *platform* media sosial justru berhasil menciptakan perhatian interanasional. Tingginya prevalensi kasus ini terjadi di seluruh dunia telah mendorong orang-orang turut mendukung memajukan masalah ini sebagai masalah global. Momentum terjadi melalui meluasnya kesadaran orang-orang di seluruh dunia yang ditandai dengan

terciptanya mobilisasi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara terutama di Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* tercipta secara independen dan bersamaan di beberapa negara untuk bekerja menyuarakan satu isu yang sama yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa tercipta secara bersamaan untuk memperjuangkan satu tujuan yang sama yakni memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif di negaranya masing-masing. Momentum *#MeToo* yang terjadi secara global tersebut tentunya akan menjadi peluang meningkatnya resonansi kesadaran nasional di Amerika Serikat. Ketika masyarakat mulai bersuara memajukan isu secara masif maka akan menjadi sinyal bagi aktor negara untuk menanggapi permasalahan tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, dampak dari momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan pelaporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, melalui meningkatnya laporan di berbagai bidang industri (Ennis & Wolfe, 2018).

Lembaga Kongres AS juga menghadapi dampak meningkatnya laporan selama tahun 2017-2018, yang mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018). Kongres merupakan badan legislatif yang seharusnya memiliki perlindungan kuat terhadap hal ini, namun juga memiliki prevalensi kasus yang tinggi. Hukum yang menangani pelecehan seksual di Kongres AS sendiri juga dinilai belum efektif mewakili masalah pelecehan seksual di tempat kerjanya.

Sejak dimulainya Gerakan *#MeToo* AS pada Oktober 2017 hingga Agustus 2018 terdapat 35 persen liputan di tingkat nasional tentang pelecehan seksual yang menyebutkan tagar *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Dalam sebuah penelitian

menemukan antara 80 dan 700 artikel dalam sebulan yang berfokus pada Gerakan *#MeToo* dalam konteks cerita tentang kasus domestik tentang kekerasan seksual (Ennis & Wolfe, 2018). Selama empat bulan di tahun 2018, proporsi cerita tentang pelecehan seksual di tingkat nasional yang menyebutkan Gerakan *#MeToo* selalu mencapai di atas 50 persen (Ennis & Wolfe, 2018).

Gerakan *#MeToo* AS semakin mendapatkan perhatian nasional ketika menemukan jejak bahwa '*MeToo*' sendiri telah digunakan oleh sebuah gerakan akar rumput yang didirikan sejak tahun 2006 di Alabama, negara bagian Amerika Serikat (Carlsen, et al., 2018). Gerakan lokal yang didirikan oleh Tarana Burke ini pada awalnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menangani penyembuhan bagi para penyintas pelecehan seksual, khususnya wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019). Momentum *#MeToo* telah mendorong Gerakan *MeToo* terdahulu yang kurang mendapatkan perhatian publik telah menjadi sorotan publik saat ini terutama dalam media nasional AS.

Peningkatan pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo* telah meluas di seluruh bidang industri AS. Dalam survei Bloomberg di AS, mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan seksual di berbagai bidang tempat kerja pasca momentum *#MeToo* (Griffin, Recht, & Green, 2018). Menurut data yang dikumpulkan oleh *Women's Media Center* AS dari Mei 2017 hingga agustus 2018, menunjukkan jumlah keseluruhan cerita tentang pelecehan seksual di berbagai arena, yakni 1.076 di media, 2.250 di Gereja, 2.624 di politik, dan 4.198 di Hollywood (Ennis & Wolfe, 2018).

Peningkatan kesadaran meluas di seluruh negara bagian dibuktikan pada tahun 2018, terdapat 32 negara yang memperkenalkan lebih dari 125 undang-undang tentang pelecehan seksual (National Conference of State Legislatures , 2018). Dalam laporan ini menunjukkan data dimana sebagian telah berhasil di adopsi dan diberlakukan, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan (National Conference of State Legislatures , 2018). Di sisi lain, hukum federal dalam menangani kasus ini tengah mengalami tuntutan perubahan oleh masyarakat pasca momentum Gerakan *#MeToo*.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja melalui Gerakan *#MeToo*, memberi sinyal bahwasanya sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam mewakili masalah tersebut. Sehingga melalui aktivisme Gerakan *#MeToo* AS, mereka berupaya mendorong reformasi terhadap kebijakan federal yang menangani pelecehan seksual di semua tempat kerja secara umum di Amerika Serikat. Maka, penelitian akan berusaha meneliti keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS melalui aktivisme transnasionalnya dalam mencapai tujuannya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja di Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengaruh Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pelecehan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai keberhasilan Gerakan #MeToo AS dalam mendorong pemerintah AS responsif terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Berbicara mengenai pengaruh, maka dalam skripsi ini penulis akan menganalisis upaya Gerakan #MeToo dalam mencapai tujuannya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Memanfaatkan momentum yang telah menciptakan *platform* aktivisme transnasional bagi Gerakan #MeToo AS, penelitian ini akan mengidentifikasi bagian ini sebagai upaya awal gerakan. Selanjutnya, penulis akan menelusuri strategi atau taktik yang dikembangkan oleh para aktivis gerakan dalam mengejar tujuannya tersebut. Tujuan akhir dari skripsi ini akan menghasilkan analisis berupa pencapaian dari Gerakan #MeToo AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari gerakan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Peningkatan kesadaran akan masalah ini telah mendorong munculnya aktor-aktor non-negara baik berupa gerakan, maupun organisasi yang berupaya mengambil peran dalam memajukan masalah. Gerakan #MeToo AS dan mobilisasi serupa yang terjadi di berbagai negara telah muncul untuk mendorong perubahan perilaku negara secara masif di masing-masing negaranya tersebut. Upaya secara bersamaan telah menunjukkan eksistensi aktor-aktor non-negara yang mulai menjadi pemain utama dalam politik internasional.

Pergerakan *#MeToo* secara transnasional dalam memajukan isu dan mendorong kebijakan baru yang mewakili pelecehan seksual di tempat kerja menjadi penting bagi negara-negara yang terkena dampak politik oleh gerakan. Problematika ini penting bagi pembahasan dalam Hubungan Internasional karena berbicara tentang aktivisme sebuah gerakan yang membawa isu yang merupakan masalah global dan bergerak secara transnasional untuk mempengaruhi perilaku aktor negara. Dengan intervensi serangkaian gerakan maupun organisasi-organisasi internasional yang mengadvokasikan *#MeToo* dapat memberikan dampak perubahan politik besar bagi negara-negara khususnya Amerika Serikat yang merupakan pembahasan dalam skripsi ini.

1.5. Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini menggarisbawahi dampak Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Penelitian mengambil jangka waktu mulai tahun 2017 di mana momentum *#MeToo* terjadi hingga perkembangan gerakan pada tahun 2019 pada bulan September. Gerakan *#MeToo* terdiri dari serangkaian gerakan-gerakan maupun organisasi beserta individu secara global yang memajukan isu pelecehan seksual di tempat kerja menjadi arus utama diskusi internasional. Strategi para aktivis tersebut mempengaruhi kebijakan secara global yakni berbeda-beda pada tiap negara, sehingga dalam penelitian ini akan menyempitkan fokus pada dampak Gerakan *#MeToo* AS terhadap reformasi legislatif Amerika Serikat.

1.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai Jaringan Advokasi Transnasional, termasuk beberapa literatur khususnya berkaitan dengan aktivisme dan perkembangan gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat selama tahun 2017-2018, serta literatur tentang masalah pelecehan seksual sebagai materi pendukung dan pembandingan dalam penelitian ini.

Gerakan *#MeToo* global telah membawa perhatian terhadap isu pelecehan seksual di dunia kerja. Dampak dari gerakan ini telah mempengaruhi peningkatan laporan atas masalah tersebut di berbagai negara salah satunya di Amerika Serikat. Sebelum momentum Gerakan *#MeToo* terjadi, hampir satu dari dua perempuan AS mengalami pelecehan seksual di tempat kerja namun mereka enggan melakukan pelaporan hukum. Dalam tulisannya, *'The Penalties For Self-Reporting Sexual Harassment'*, Chloe Grace Hart (2019) meneliti terkait keengganan perempuan Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja. Sedangkan prevalensi kasus ini cukup tinggi di alami mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya sifat bias berupa diskriminasi normatif, bahwa perempuan yang melaporkan pelecehan seksual dipandang kurang bermoral, dan tidak terampil secara sosial. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan *#MeToo* dalam menurunkan bias dan strootip negatif mengenai perempuan yang melaporkan pelecehan seksual. Dengan kontribusi gerakan yang berupaya dalam merubah perspektif normatif tersebut, telah berhasil mendorong banyak perempuan mulai berbicara untuk melaporkan pelecehan seksual secara hukum.

Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan suatu masalah yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Dalam *'Equality through*

litigation: sexual harassment in the United States', Zippel (2006), menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42). Sehingga memungkinkan pengadilan AS jauh lebih responsif terhadap pelanggaran tersebut daripada negara lain di dunia. Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Dalam tulisannya Zippel mengkritisi sistem hukum tersebut agar diperluas lebih dalam dimana pengadilan dinilai belum efektif menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, negara-negara Eropa juga telah mengadopsi definisi pelecehan seksual dari Amerika Serikat dimana kasus ini marak terjadi di negara-negara Eropa pada tahun 1970-an. Pemahaman luas dan kesadaran orang-orang lintas negara Eropa terhadap masalah ini telah mendorong aktor-aktor non-negara untuk bekerja sama. Dalam *'Transnational Advocacy Networks and Policy Cycles in the European Union: The Case of Sexual Harassment'*, Zippel (2004) menemukan bahwa kaum feminis di negara-negara Eropa berhasil mengembangkan keahlian transnasional tentang pelecehan seksual melalui TAN tentang kesetaraan gender di Uni Eropa (Zippel, 2004, p. 57). Masalah ini tidak memiliki perlindungan hukum di negara-negara Eropa, padahal pelanggaran kasus ini kerap terjadi. Hasil dari TAN kesetaraan gender tersebut berhasil mendorong Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki *power* untuk menekan negara-negara anggota dengan memberlakukan UU yang membahas tentang masalah pelecehan seksual pada tahun 2002 (Zippel, 2004, p. 67).

Penciptaan TAN sebagian besar dikaitkan dengan norma-norma tertentu. Dalam *'Transnational advocacy networks and moral commitment: The free Tibet campaign meets the Chinese state'* oleh Stephen Noakes (2012), telah menunjukkan sebuah studi kasus tentang kampanye transnasional untuk kedaulatan Tibet dan keterlibatannya dengan Tiongkok. Temuan dari tulisan ini, bahwa jaringan transnasional advokasi yang bekerja pada kasus ini cenderung mensosialisasikan negara-negara ke norma-norma perilaku tertentu, di mana komitmen moral menjadi poin utama dalam interaksi dengan pemerintah target. Representasi budaya yang mengarah pada tatanan moral telah menjadi peran sentral dalam keberhasilan kemerdekaan Tibet.

Kovertensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam hal ini penulis mengambil literatur yang membawa pemahaman terkait norma dan nilai-nilai yang dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika dan perubahan politik. Dalam *'International Norm Dynamics and Political Change'*, Finnemore & Sikkink (1998), memfokuskan salah satunya pada tiga aspek norma asal yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh para aktor untuk mempengaruhi dan memilih kondisi di mana norma akan berpengaruh dalam politik dunia. Sebuah norma muncul melalui tiga tahap; *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*, dimana tahapan-tahapan tersebut di bangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat terhadap perilaku yang baginya sesuai ada di dalam lingkungan mereka.

Pada literatur pertama, yang berbicara mengenai dampak adanya Gerakan #MeToo di Amerika Serikat pada pengaruh pandangan normatif telah mendorong

penelitian ini untuk meninjau dampak lebih luas dari gerakan. Penelitian pada literatur tersebut telah meneliti dampak pada peningkatan laporan di tingkat nasional. Sehingga penelitian dalam skripsi ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan melalui pengaruh pada perubahan kebijakan negara.

Pada literatur selanjutnya, telah menjadi dasar dalam skripsi ini untuk mempelajari sejarah pelecehan seksual AS di mana istilah ini pertama kali diperkenalkan di dunia oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Zippel, 2006, p. 42). Pada saat yang sama, kesadaran akan besarnya masalah ini membuat masyarakat di negara-negara Eropa memobilisasi massa melalui penciptaan TAN atau jaringan advokasi transnasional yang ditemukan dalam literatur ketiga. Aktivisme TAN kesetaraan gender tersebut telah membawa tuntutan hukum untuk menangani masalah pelecehan seksual di negara-negara Eropa dan telah mencapai keberhasilan. Literatur ini telah menunjukkan terciptanya TAN melalui isu pelecehan seksual, sehingga dengan fokus yang sama akan menjadi referensi bagi skripsi ini.

Pada literatur keempat, telah menunjukkan studi kasus lainnya mengenai aktivisme TAN di mana pengaruh moral berperan sangat kuat dalam membangun jaringan. Kovergensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam mempengaruhi politik, norma juga mengalami tahapan-tahapan tertentu di mana pemahaman terhadap hal ini terdapat pada literatur kelima. Kedua literature ini berkontribusi sebagai pembangun pemahaman atas apa yang mendasari terbentuknya TAN di mana dalam skripsi ini akan membahas terkait isu pelecehan

seksual yang merupakan bagian dari pembangunan norma kolektif. Namun, dalam sebagian besar dari tulisan tersebut terlalu fokus pada peranan moral saja sehingga mengesampingkan peranan faktor lainnya yang turut membangun aktivisme TAN.

Keseluruhan dalam tinjauan pustaka ini telah menarik perhatian penulis untuk melanjutkan penelitian mengenai isu pelecehan seksual yang mendorong aktivisme transnasional dari Gerakan *#MeToo* khususnya di Amerika Serikat. Dengan pemahaman terkait masalah, serta beberapa literatur dengan studi kasus TAN, penulis akan mengembangkan penelitian mengenai TAN melalui studi kasus Gerakan *#MeToo*. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan pada pengaruh pada perubahan kebijakan negara. Melalui kompleksitas pertukaran informasi dari aktor-aktor yang berperan dalam Gerakan *#MeToo* yang berasal dari aktivisme media sosial, menjadi karakteristik tersendiri bagi proses pembentukan dan strategi gerakan dalam analisis TAN yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.7. Landasan Konseptual

Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Jaringan Advokasi Transnasional yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam *“Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”*. *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Jaringan ini banyak terjadi di area isu yang

ditandai oleh konten bernilai tinggi seperti; hak asasi manusia, isu lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan masyarakat adat (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Dalam penelitian ini, bentuk aktivisme Gerakan #MeToo dapat dijelaskan melalui teori *Transnational Advocacy Network*, di mana gerakan ini bekerja secara transnasional yang mencakup berberapa aktor di dalamnya, khususnya beberapa organisasi perempuan, dengan membawa satu isu, yang berfokus pada pelecehan seksual di tempat kerja. Skripsi ini akan berusaha menganalisa pengaruh Gerakan #MeToo AS melalui teori TAN menurut Keck & Sikkink dengan indikator berupa; faktor pendorong aktivisme transnasional gerakan; taktik gerakan; dan berakhir pada pencapaian gerakan.

TAN membingkai masalah agar dipahami oleh khalayak sasaran, menarik perhatian, dan mendorong tindakan kolektif dalam membentuk pemahaman bersama terhadap suatu isu. TAN terbentuk di sekitar isu-isu dimana informasi memainkan peran kunci, dengan konsep jaringan berjalan melalui hubungan terbuka antara para pelaku yang berkomitmen dan berpengetahuan luas yang bekerja di bidang isu khusus (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kemunculan TAN didorong tiga faktor, yaitu *boomerang pattern*, *activist* atau *political entrepreneurs* dan *international conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

'*Boomerang pattern*' menjadi karakteristik utama dari TAN di mana target kegiatan mereka adalah mengubah perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pola bumerang terjadi ketika hubungan antara aktor negara dan kelompok-kelompok domestik terputus, maka LSM domestik akan mencari sekutu internasional untuk mencoba memberi tekanan pada negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kontak internasional digunakan untuk memperkuat

permintaan kelompok domestik karena pemerintahnya tidak responsif (Keck & Sikkink, 1999). Adanya aktivis atau '*Political entrepreneurs*' juga merupakan yang mendorong terbentuknya jaringan dan secara aktif mempromosikannya untuk memajukan misi dan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka membentuk jaringan ketika mereka percaya itu akan memajukan misi organisasi mereka dengan berbagi informasi, mendapatkan visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, memperbanyak saluran akses institusional, dan sebagainya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Faktor selanjutnya adalah tersedianya '*international conferences*' maupun bentuk kontak internasional lainnya yang menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktor-aktor dalam TAN dapat berupa; LSM internasional dan domestik maupun organisasi penelitian dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; dan bagian dari eksekutif ataupun cabang pemerintahan parlementer (Keck & Sikkink, 1999, pp. 91-92). Tidak semua aktor-aktor tersebut hadir dalam setiap jaringan advokasi. LSM biasanya menjadi aktor utama, dimana mereka memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan dengan memulai tindakan melalui menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, '*informations politics*' yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang

memiliki dampak besar. *Kedua*, 'symbolic Politics' yaitu kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh. *Ketiga*, 'leverage politics' yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. *Keempat*, 'accountability politics' yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan.

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan. Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan bagaimana upaya Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi perubahan kebijakan AS. Upaya gerakan tersebut tentunya pada akhirnya akan menghasilkan suatu pencapaian.

Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh TAN dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor target' yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam hal ini pencapaian Gerakan

#*MeToo* dapat diidentifikasi pada tahap tertentu berdasarkan analisis menggunakan Teori '*Transnational Advocacy Network*'.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 1989, pp. 2-3).

1.8.2. Subjek Penelitian

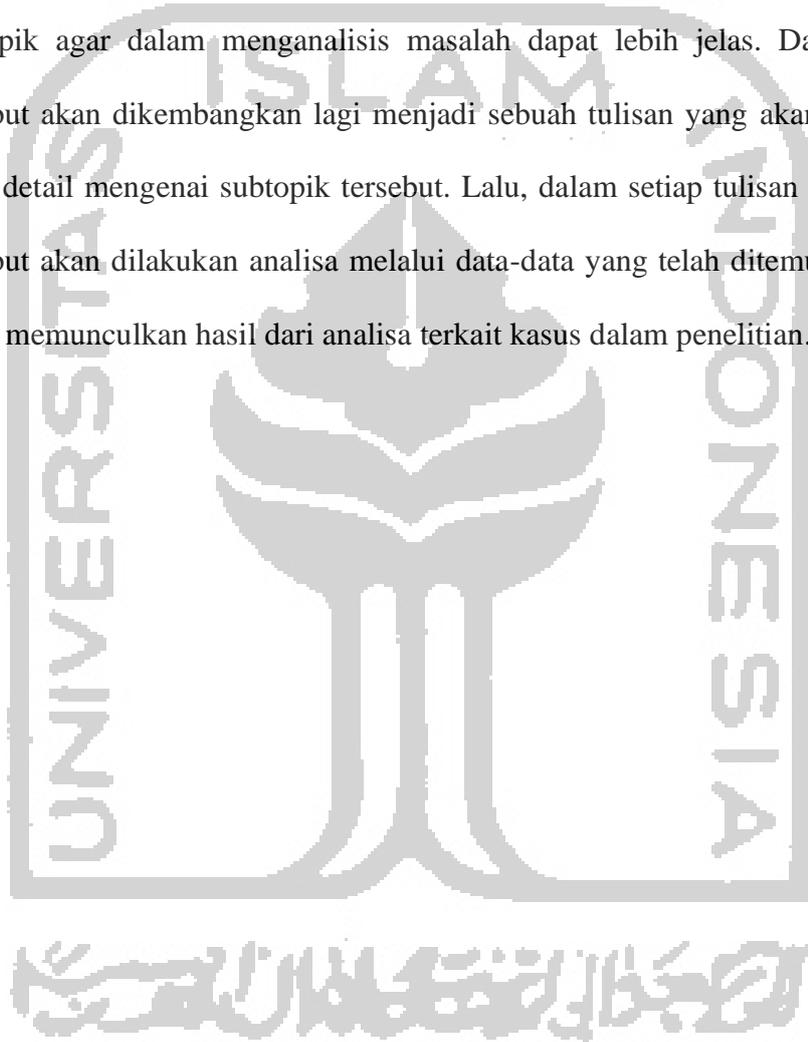
Subjek Penelitian ini adalah Gerakan #*MeToo* di Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa mengenai perubahan kebijakan AS terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja yang dipengaruhi oleh Gerakan #*MeToo* AS. Dengan meningkatnya dampak politik dari Gerakan #*MeToo* secara nasional pasca momentum #*MeToo* telah menunjukkan perlunya reformasi terhadap sistem hukum AS yang menangani masalah tersebut.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

1.8.4. Proses Penelitian

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perluasan isu melalui aktivisme media sosial merupakan fenomena global kontemporer yang umum terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya kampanye global melalui *hashtag* yang berkembang menjadi isu global saat ini yaitu fenomena meluasnya tagar *#MeToo* di seluruh dunia. Berawal pada tahun 2017 seorang aktris *Hollywood*, Alyssa Milano menggunakan *hashtag* *#MeToo* untuk mendapatkan dukungan atas cerita pribadinya tentang pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja (Garcia, 2017). Dengan kecepatan media sosial dan status Milano sebagai seorang selebriti, tagar menyebar secara global melalui respons orang-orang dari berbagai negara. Tagar *#MeToo* telah menjadi arus utama di media global dalam menyuarakan masalah pelecehan seksual di tempat kerja.

Disisi lain, praktik pelecehan seksual terutama di tempat kerja sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan seksual, dimana dalam sejarah hal ini telah mengakar dalam konteks perbudakan yang dialami oleh wanita (Siegel, 2003, p. 3). Konsep dan definisi pelecehan seksual pertama kali diperkenalkan oleh feminis AS pada pertengahan 1970-an, dimana Pengadilan AS adalah yang pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42).

Di Amerika Serikat, pengakuan atas klaim yang mengarah pada tindakan ini dimasukkan secara hukum pertama kali dimasukkan dalam Judul VII Undang-Undang Hak Sipil 1964 sebagai diskriminasi jenis kelamin (Siegel, 2003, p. 8). Istilah “pelecehan seksual” muncul pada diskusi yang diadakan Lin Farley pada tahun 1974 dalam kursus Universitas Cornell tentang wanita dan pekerjaan (Siegel, 2003, p. 8). Pada awal 1980-an, EEOC (*Equal Employment Opportunity*) mulai mengakui pelecehan seksual sebagai bagian dari larangan diskriminasi UU Hak Sipil tahun 1964 (EEOC, 2019). Sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS telah melalui beberapa pembaharuan sejak pertama kali dikeluarkan melalui *Title VII Civil Rights Act* 1964 tersebut dan diberlakukan hingga saat ini (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. , 2018).

Meskipun AS sendiri telah memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual, masalah ini masih memiliki prevalensi tinggi dialami masyarakat AS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif mencegah dan menangani pelecehan seksual di AS. Namun, masalah ini kurang diperhatikan oleh pemerintah AS sementara kesadaran masyarakat akan hal ini juga rendah. Akibatnya muncul seorang warga domestik memprovokasi masalah agar mendapatkan perhatian nasional.

Langkah yang dilakukan dengan menunjukkan masalah ini melalui *platform* media sosial justru berhasil menciptakan perhatian interanasional. Tingginya prevalensi kasus ini terjadi di seluruh dunia telah mendorong orang-orang turut mendukung memajukan masalah ini sebagai masalah global. Momentum terjadi melalui meluasnya kesadaran orang-orang di seluruh dunia yang ditandai dengan

terciptanya mobilisasi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara terutama di Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* tercipta secara independen dan bersamaan di beberapa negara untuk bekerja menyuarakan satu isu yang sama yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa tercipta secara bersamaan untuk memperjuangkan satu tujuan yang sama yakni memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif di negaranya masing-masing. Momentum *#MeToo* yang terjadi secara global tersebut tentunya akan menjadi peluang meningkatnya resonansi kesadaran nasional di Amerika Serikat. Ketika masyarakat mulai bersuara memajukan isu secara masif maka akan menjadi sinyal bagi aktor negara untuk menanggapi permasalahan tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, dampak dari momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan pelaporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, melalui meningkatnya laporan di berbagai bidang industri (Ennis & Wolfe, 2018).

Lembaga Kongres AS juga menghadapi dampak meningkatnya laporan selama tahun 2017-2018, yang mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018). Kongres merupakan badan legislatif yang seharusnya memiliki perlindungan kuat terhadap hal ini, namun juga memiliki prevalensi kasus yang tinggi. Hukum yang menangani pelecehan seksual di Kongres AS sendiri juga dinilai belum efektif mewakili masalah pelecehan seksual di tempat kerjanya.

Sejak dimulainya Gerakan *#MeToo* AS pada Oktober 2017 hingga Agustus 2018 terdapat 35 persen liputan di tingkat nasional tentang pelecehan seksual yang menyebutkan tagar *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Dalam sebuah penelitian

menemukan antara 80 dan 700 artikel dalam sebulan yang berfokus pada Gerakan *#MeToo* dalam konteks cerita tentang kasus domestik tentang kekerasan seksual (Ennis & Wolfe, 2018). Selama empat bulan di tahun 2018, proporsi cerita tentang pelecehan seksual di tingkat nasional yang menyebutkan Gerakan *#MeToo* selalu mencapai di atas 50 persen (Ennis & Wolfe, 2018).

Gerakan *#MeToo* AS semakin mendapatkan perhatian nasional ketika menemukan jejak bahwa '*MeToo*' sendiri telah digunakan oleh sebuah gerakan akar rumput yang didirikan sejak tahun 2006 di Alabama, negara bagian Amerika Serikat (Carlsen, et al., 2018). Gerakan lokal yang didirikan oleh Tarana Burke ini pada awalnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menangani penyembuhan bagi para penyintas pelecehan seksual, khususnya wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019). Momentum *#MeToo* telah mendorong Gerakan *MeToo* terdahulu yang kurang mendapatkan perhatian publik telah menjadi sorotan publik saat ini terutama dalam media nasional AS.

Peningkatan pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo* telah meluas di seluruh bidang industri AS. Dalam survei Bloomberg di AS, mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan seksual di berbagai bidang tempat kerja pasca momentum *#MeToo* (Griffin, Recht, & Green, 2018). Menurut data yang dikumpulkan oleh *Women's Media Center* AS dari Mei 2017 hingga agustus 2018, menunjukkan jumlah keseluruhan cerita tentang pelecehan seksual di berbagai arena, yakni 1.076 di media, 2.250 di Gereja, 2.624 di politik, dan 4.198 di Hollywood (Ennis & Wolfe, 2018).

Peningkatan kesadaran meluas di seluruh negara bagian dibuktikan pada tahun 2018, terdapat 32 negara yang memperkenalkan lebih dari 125 undang-undang tentang pelecehan seksual (National Conference of State Legislatures , 2018). Dalam laporan ini menunjukkan data dimana sebagian telah berhasil di adopsi dan diberlakukan, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan (National Conference of State Legislatures , 2018). Di sisi lain, hukum federal dalam menangani kasus ini tengah mengalami tuntutan perubahan oleh masyarakat pasca momentum Gerakan *#MeToo*.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja melalui Gerakan *#MeToo*, memberi sinyal bahwasanya sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam mewakili masalah tersebut. Sehingga melalui aktivisme Gerakan *#MeToo* AS, mereka berupaya mendorong reformasi terhadap kebijakan federal yang menangani pelecehan seksual di semua tempat kerja secara umum di Amerika Serikat. Maka, penelitian akan berusaha meneliti keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS melalui aktivisme transnasionalnya dalam mencapai tujuannya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja di Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengaruh Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pelecehan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai keberhasilan Gerakan #MeToo AS dalam mendorong pemerintah AS responsif terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Berbicara mengenai pengaruh, maka dalam skripsi ini penulis akan menganalisis upaya Gerakan #MeToo dalam mencapai tujuannya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Memanfaatkan momentum yang telah menciptakan *platform* aktivisme transnasional bagi Gerakan #MeToo AS, penelitian ini akan mengidentifikasi bagian ini sebagai upaya awal gerakan. Selanjutnya, penulis akan menelusuri strategi atau taktik yang dikembangkan oleh para aktivis gerakan dalam mengejar tujuannya tersebut. Tujuan akhir dari skripsi ini akan menghasilkan analisis berupa pencapaian dari Gerakan #MeToo AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari gerakan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Peningkatan kesadaran akan masalah ini telah mendorong munculnya aktor-aktor non-negara baik berupa gerakan, maupun organisasi yang berupaya mengambil peran dalam memajukan masalah. Gerakan #MeToo AS dan mobilisasi serupa yang terjadi di berbagai negara telah muncul untuk mendorong perubahan perilaku negara secara masif di masing-masing negaranya tersebut. Upaya secara bersamaan telah menunjukkan eksistensi aktor-aktor non-negara yang mulai menjadi pemain utama dalam politik internasional.

Pergerakan *#MeToo* secara transnasional dalam memajukan isu dan mendorong kebijakan baru yang mewakili pelecehan seksual di tempat kerja menjadi penting bagi negara-negara yang terkena dampak politik oleh gerakan. Problematika ini penting bagi pembahasan dalam Hubungan Internasional karena berbicara tentang aktivisme sebuah gerakan yang membawa isu yang merupakan masalah global dan bergerak secara transnasional untuk mempengaruhi perilaku aktor negara. Dengan intervensi serangkaian gerakan maupun organisasi-organisasi internasional yang mengadvokasikan *#MeToo* dapat memberikan dampak perubahan politik besar bagi negara-negara khususnya Amerika Serikat yang merupakan pembahasan dalam skripsi ini.

1.5. Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini menggarisbawahi dampak Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Penelitian mengambil jangka waktu mulai tahun 2017 di mana momentum *#MeToo* terjadi hingga perkembangan gerakan pada tahun 2019 pada bulan September. Gerakan *#MeToo* terdiri dari serangkaian gerakan-gerakan maupun organisasi beserta individu secara global yang memajukan isu pelecehan seksual di tempat kerja menjadi arus utama diskusi internasional. Strategi para aktivis tersebut mempengaruhi kebijakan secara global yakni berbeda-beda pada tiap negara, sehingga dalam penelitian ini akan menyempitkan fokus pada dampak Gerakan *#MeToo* AS terhadap reformasi legislatif Amerika Serikat.

1.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai Jaringan Advokasi Transnasional, termasuk beberapa literatur khususnya berkaitan dengan aktivisme dan perkembangan gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat selama tahun 2017-2018, serta literatur tentang masalah pelecehan seksual sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Gerakan *#MeToo* global telah membawa perhatian terhadap isu pelecehan seksual di dunia kerja. Dampak dari gerakan ini telah mempengaruhi peningkatan laporan atas masalah tersebut di berbagai negara salah satunya di Amerika Serikat. Sebelum momentum Gerakan *#MeToo* terjadi, hampir satu dari dua perempuan AS mengalami pelecehan seksual di tempat kerja namun mereka enggan melakukan pelaporan hukum. Dalam tulisannya, *'The Penalties For Self-Reporting Sexual Harassment'*, Chloe Grace Hart (2019) meneliti terkait keengganan perempuan Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja. Sedangkan prevalensi kasus ini cukup tinggi di alami mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya sifat bias berupa diskriminasi normatif, bahwa perempuan yang melaporkan pelecehan seksual dipandang kurang bermoral, dan tidak terampil secara sosial. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan *#MeToo* dalam menurunkan bias dan stereotip negatif mengenai perempuan yang melaporkan pelecehan seksual. Dengan kontribusi gerakan yang berupaya dalam merubah perspektif normatif tersebut, telah berhasil mendorong banyak perempuan mulai berbicara untuk melaporkan pelecehan seksual secara hukum.

Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan suatu masalah yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Dalam *'Equality through litigation: sexual harassment in the United States'*, Zippel (2006), menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin

(Zippel, 2006, p. 42). Sehingga memungkinkan pengadilan AS jauh lebih responsif terhadap pelanggaran tersebut daripada negara lain di dunia. Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Dalam tulisannya Zippel mengkritisi sistem hukum tersebut agar diperluas lebih dalam dimana pengadilan dinilai belum efektif menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, negara-negara Eropa juga telah mengadopsi definisi pelecehan seksual dari Amerika Serikat dimana kasus ini marak terjadi di negara-negara Eropa pada tahun 1970-an. Pemahaman luas dan kesadaran orang-orang lintas negara Eropa terhadap masalah ini telah mendorong aktor-aktor non-negara untuk bekerja sama. Dalam *'Transnational Advocacy Networks and Policy Cycles in the European Union: The Case of Sexual Harassment'*, Zippel (2004) menemukan bahwa kaum feminis di negara-negara Eropa berhasil mengembangkan keahlian transnasional tentang pelecehan seksual melalui TAN tentang kesetaraan gender di Uni Eropa (Zippel, 2004, p. 57). Masalah ini tidak memiliki perlindungan hukum di negara-negara Eropa, padahal pelanggaran kasus ini kerap terjadi. Hasil dari TAN kesetaraan gender tersebut berhasil mendorong Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki *power* untuk menekan negara-negara anggota dengan memberlakukan UU yang membahas tentang masalah pelecehan seksual pada tahun 2002 (Zippel, 2004, p. 67).

Penciptaan TAN sebagian besar dikaitkan dengan norma-norma tertentu. Dalam *'Transnational advocacy networks and moral commitment: The free Tibet campaign meets the Chinese state'* oleh Stephen Noakes (2012), telah menunjukkan sebuah studi kasus tentang kampanye transnasional untuk kedaulatan Tibet dan keterlibatannya dengan Tiongkok. Temuan dari tulisan ini, bahwa jaringan transnasional advokasi yang bekerja pada kasus ini cenderung mensosialisasikan negara-negara ke norma-norma perilaku tertentu, di mana komitmen moral menjadi poin utama dalam interaksi dengan pemerintah target. Representasi

budaya yang mengarah pada tatanan moral telah menjadi peran sentral dalam keberhasilan kemerdekaan Tibet.

Koherensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam hal ini penulis mengambil literatur yang membawa pemahaman terkait norma dan nilai-nilai yang dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika dan perubahan politik. Dalam '*International Norm Dynamics and Political Change*', Finnemore & Sikkink (1998), memfokuskan salah satunya pada tiga aspek norma asal yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh para aktor untuk mempengaruhi dan memilih kondisi di mana norma akan berpengaruh dalam politik dunia. Sebuah norma muncul melalui tiga tahap; *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*, dimana tahapan-tahapan tersebut dibangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat terhadap perilaku yang baginya sesuai ada di dalam lingkungan mereka.

Pada literatur pertama, yang berbicara mengenai dampak adanya Gerakan #MeToo di Amerika Serikat pada pengaruh pandangan normatif telah mendorong penelitian ini untuk meninjau dampak lebih luas dari gerakan. Penelitian pada literatur tersebut telah meneliti dampak pada peningkatan laporan di tingkat nasional. Sehingga penelitian dalam skripsi ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan melalui pengaruh pada perubahan kebijakan negara.

Pada literatur selanjutnya, telah menjadi dasar dalam skripsi ini untuk mempelajari sejarah pelecehan seksual AS di mana istilah ini pertama kali diperkenalkan di dunia oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Zippel, 2006, p. 42). Pada saat yang sama, kesadaran akan besarnya masalah ini membuat masyarakat di negara-negara Eropa memobilisasi massa melalui penciptaan TAN atau jaringan advokasi transnasional yang ditemukan dalam literatur ketiga. Aktivisme TAN kesetaraan gender tersebut telah membawa tuntutan hukum untuk menangani masalah pelecehan seksual di negara-negara Eropa dan telah mencapai

keberhasilan. Literatur ini telah menunjukkan terciptanya TAN melalui isu pelecehan seksual, sehingga dengan fokus yang sama akan menjadi referensi bagi skripsi ini.

Pada literatur keempat, telah menunjukkan studi kasus lainnya mengenai aktivisme TAN di mana pengaruh moral berperan sangat kuat dalam membangun jaringan. Kovergensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam mempengaruhi politik, norma juga mengalami tahapan-tahapan tertentu di mana pemahaman terhadap hal ini terdapat pada literatur kelima. Kedua literature ini berkontribusi sebagai pembangun pemahaman atas apa yang mendasari terbentuknya TAN di mana dalam skripsi ini akan membahas terkait isu pelecehan seksual yang merupakan bagian dari pembangunan norma kolektif. Namun, dalam sebagian besar dari tulisan tersebut terlalu fokus pada peranan moral saja sehingga mengesampingkan peranan faktor lainnya yang turut membangun aktivisme TAN.

Keseluruhan dalam tinjauan pustaka ini telah menarik perhatian penulis untuk melanjutkan penelitian mengenai isu pelecehan seksual yang mendorong aktivisme transnasional dari Gerakan *#MeToo* khususnya di Amerika Serikat. Dengan pemahaman terkait masalah, serta beberapa literatur dengan studi kasus TAN, penulis akan mengembangkan penelitian mengenai TAN melalui studi kasus Gerakan *#MeToo*. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan pada pengaruh pada perubahan kebijakan negara. Melalui kompleksitas pertukaran informasi dari aktor-aktor yang berperan dalam Gerakan *#MeToo* yang berasal dari aktivisme media sosial, menjadi karakteristik tersendiri bagi proses pembentukan dan strategi gerakan dalam analisis TAN yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.7. Landasan Konseptual

Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Jaringan Advokasi Transnasional yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam “*Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*”. *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Jaringan ini banyak terjadi di area isu yang ditandai oleh konten bernilai tinggi seperti; hak asasi manusia, isu lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan masyarakat adat (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Dalam penelitian ini, bentuk aktivisme Gerakan #MeToo dapat dijelaskan melalui teori *Transnational Advocacy Network*, di mana gerakan ini bekerja secara transnasional yang mencakup berberapa aktor di dalamnya, khususnya beberapa organisasi perempuan, dengan membawa satu isu, yang berfokus pada pelecehan seksual di tempat kerja. Skripsi ini akan berusaha menganalisa pengaruh Gerakan #MeToo AS melalui teori TAN menurut Keck & Sikkink dengan indikator berupa; faktor pendorong aktivisme transnasional gerakan; taktik gerakan; dan berakhir pada pencapaian gerakan.

TAN mbingkai masalah agar dipahami oleh khalayak sasaran, menarik perhatian, dan mendorong tindakan kolektif dalam membentuk pemahaman bersama terhadap suatu isu. TAN terbentuk di sekitar isu-isu dimana informasi memainkan peran kunci, dengan konsep jaringan berjalan melalui hubungan terbuka antara para pelaku yang berkomitmen dan berpengetahuan luas yang bekerja di bidang isu khusus (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kemunculan TAN didorong tiga faktor, yaitu *boomerang pattern*, *activist* atau *political entrepreneurs* dan *international conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

‘*Boomerang pattern*’ menjadi karakteristik utama dari TAN di mana target kegiatan mereka adalah mengubah perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pola bumerang

terjadi ketika hubungan antara aktor negara dan kelompok-kelompok domestik terputus, maka LSM domestik akan mencari sekutu internasional untuk mencoba memberi tekanan pada negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kontak internasional digunakan untuk memperkuat permintaan kelompok domestik karena pemerintahnya tidak responsif (Keck & Sikkink, 1999). Adanya aktivis atau '*Political entrepreneurs*' juga merupakan yang mendorong terbentuknya jaringan dan secara aktif mempromosikannya untuk memajukan misi dan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka membentuk jaringan ketika mereka percaya itu akan memajukan misi organisasi mereka dengan berbagi informasi, mendapatkan visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, memperbanyak saluran akses institusional, dan sebagainya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Faktor selanjutnya adalah tersedianya '*international conferences*' maupun bentuk kontak internasional lainnya yang menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktor-aktor dalam TAN dapat berupa; LSM internasional dan domestik maupun organisasi penelitian dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; dan bagian dari eksekutif ataupun cabang pemerintahan parlementer (Keck & Sikkink, 1999, pp. 91-92). Tidak semua aktor-aktor tersebut hadir dalam setiap jaringan advokasi. LSM biasanya menjadi aktor utama, dimana mereka memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan dengan memulai tindakan melalui menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, '*informations politics*' yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar. *Kedua*, '*symbolic Politics*' yaitu

kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh. *Ketiga*, 'leverage politics' yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. *Keempat*, 'accountability politics' yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan.

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan. Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan bagaimana upaya Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi perubahan kebijakan AS. Upaya gerakan tersebut tentunya pada akhirnya akan menghasilkan suatu pencapaian.

Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh TAN dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor target' yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam hal ini pencapaian Gerakan #MeToo dapat diidentifikasi pada tahap tertentu berdasarkan analisis menggunakan Teori 'Transnational Advocacy Network'.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 1989, pp. 2-3).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa mengenai perubahan kebijakan AS terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja yang dipengaruhi oleh Gerakan *#MeToo* AS. Dengan meningkatnya dampak politik dari Gerakan *#MeToo* secara nasional pasca momentum *#MeToo* telah menunjukkan perlunya reformasi terhadap sistem hukum AS yang menangani masalah tersebut.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

1.8.4. Proses Penelitian

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam

menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian.



BAB II

GERAKAN #METOO AMERIKA SERIKAT DAN AKTIVISME TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

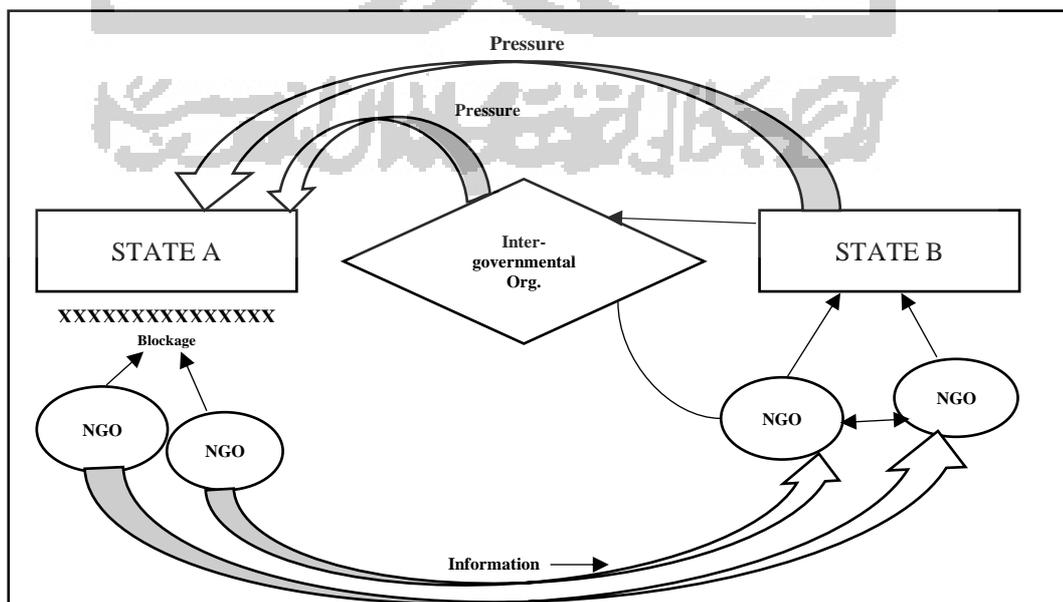
Terciptanya Gerakan #MeToo dilatarbelakangi oleh inisiatif masyarakat domestik AS untuk menarik perhatian pemerintahnya terhadap masalah pelecehan seksual di negaranya. Gerakan #MeToo tercipta melalui kampanye global melawan pelecehan seksual di tempat kerja dimana mobilisasi ini secara independen bergerak di masing-masing negara termasuk AS sendiri. Keseluruhan materi dalam bab dua ini akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mendorong proses pembentukan jaringan advokasi transnasional dari Gerakan #MeToo.

Aktivisme Gerakan #MeToo AS dan mobilisasi serupa di seluruh dunia dapat diidentifikasi sebagai *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dijelaskan oleh Keck & Sikkink. TAN merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Kemunculan dari TAN sendiri didorong oleh tiga faktor yaitu; *Boomerang pattern*; *Political entrepreneurs*; dan *International organizations and conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Tiga faktor tersebut merupakan pendorong utama dari aktivisme transnasional Gerakan #MeToo AS yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini.

2.1. *Boomerang Pattern* Dalam Aktivisme Gerakan #MeToo di Amerika Serikat

Pola bumerang terjadi ketika kelompok-kelompok lokal maupun individu memiliki klaim atas masalah tertentu, namun pemerintah tidak responsif terhadap mereka, maka mereka mencari koneksi internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kontak internasional tersebut dimaksudkan untuk memperkuat permintaan kelompok domestik, dengan membuka ruang terbuka untuk masalah baru, dan kemudian menggemakan tuntutan ini kembali ke arena domestik (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Singkatnya, pola bumerang terjadi ketika organisasi atau gerakan lokal tidak memiliki akses ke institusi negara, maka mereka akan membentuk jaringan transnasional untuk memperkuat klaim mereka agar dapat menekan negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pola bumerang oleh Keck & Sikkink dijelaskan dalam gambar 1.

Gambar 1. *Boomerang Pattern*



Sumber: Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics* (1999), hal. 94

Pola bumerang ini menjadi karakteristik utama dalam kampanye yang target dan tujuannya adalah kebijakan atau perilaku domestik suatu negara terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam penjelasan Keck & Sikkink, *boomerang pattern* terjadi ketika terdapat saluran antara pemerintah dan masyarakat domestik terputus sehingga masyarakat tidak mendapatkan akses ke institusi politik atas suatu masalah (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam kasus ini, episentrum awal Gerakan *#MeToo* berasal dari Amerika Serikat, sehingga dalam konteks *boomerang pattern*, TAN mengidentifikasi AS sebagai *State A*. Masalah yang diadvokasikan berupa pelecehan seksual di tempat kerja.

Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di tempat kerja AS sendiri telah tercantum dalam undang-undang Hak Sipil tahun 1964 (Rueb & Chokshi, 2019). Namun para korban enggan melakukan pengaduan hukum terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Menurut Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (EEOC), menemukan bahwa tiga dari empat wanita yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja tidak pernah melaporkan kejadian tersebut (Koonce, 2019). Sedangkan prevalensi kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat tergolong tinggi. Menurut perkiraan data laporan Vox

menunjukkan sekitar 627.700 korban mengalami pelecehan seksual di AS tiap tahunnya (Crockett, 2016).

Minimnya pelaporan hukum oleh masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual tersebut tentunya menunjukkan terdapat adanya suatu masalah dalam sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS. Saluran antara individu atau kelompok domestik dengan aktor negara atau pemerintah dianggap terputus ketika hukum yang menangani masalah tersebut tidak efektif dan pemerintah tidak responsif terhadap hal tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Akibatnya, muncul aktor yang cukup peduli dengan masalah tersebut untuk mengeluarkan ide dan memicu agar masalah tersebut segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam jaringan advokasi transnasional, pelaku jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam debat kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Ide yang berhasil dimunculkan dalam kasus #MeToo adalah aktivisme media sosial yang berhasil dipicu oleh seorang individu domestik Amerika Serikat sendiri. Dengan menggunakan hashtag #MeToo sebagai wacana baru bagi orang-orang untuk menumbuhkan kesadaran bersama dan menunjukkan secara terbuka tentang meluasnya masalah ini terjadi. Mencari dukungan melalui perluasan isu tersebut menunjukkan bahwa terdapat seorang individu yang telah menjadi pemicu awal advokasi yang disebabkan oleh terputusnya saluran yang didefinisikan di dalam *boomerang pattern*.

Aktor yang visioner akan muncul dan mengusulkan strategi untuk aksi politik di sekitar masalah yang tampaknya tidak terselesaikan, potensi berubah menjadi jaringan aksi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Seorang individu lebih memilih untuk mencari cara selain melakukan pengaduan ke penegak hukum karena sistem hukum dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Memajukan isu menjadi berita arus utama merupakan langkah awal dari advokasi agar mendapatkan perhatian pemerintah AS terhadap masalah pelecehan seksual yang bukan merupakan masalah baru di AS. Aktivis secara aktif mencari cara untuk membawa masalah ke agenda publik, baik dengan membingkainya dengan cara inovatif maupun dengan mencari tempat yang ramah bagi advokasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Terkadang mereka menciptakan masalah dengan membingkai masalah lama dengan cara baru, dimana mereka membantu mengubah pemahaman aktor lain tentang identitas dan minat mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Ide yang dimunculkan tersebut berhasil mencapai momentum dimana *#MeToo* telah meluas secara global dan mendorong kampanye dan kemunculan mobilisasi serupa di negara-negara lain. Para aktivis maupun LSM domestik maupun internasional mulai bermunculan secara bersamaan akibat meluasnya kesadaran atas advokasi melalui kecepatan media sosial. Mereka muncul tidak terorganisir sebagai bagian dari Gerakan *#MeToo* untuk melanjutkan advokasi dan meningkatkan intensitas perhatian terhadap masalah ini. Baik serikat

pekerja, organisasi pengusaha, organisasi perempuan, akademisi, maupun individu terhubung dalam satu pandangan yang sama.

TAN terbentuk melalui bersatunya sejumlah besar individu yang berbeda-beda, baik melalui konteks pribadi, profesional maupun organisasi untuk mengembangkan pandangan dunia yang serupa (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Jaringan dapat berupa sekutu internasional baik dari organisasi di negara lain maupun dengan negara yang memiliki visi dan perhatian yang sama terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan memiliki dukungan dari aktor-aktor tersebut, mereka akan kembali membawa advokasi lebih kuat untuk menekan negaranya dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktivisme transnasional terbentuk melalui pertukaran informasi yang ditandai dengan upaya perluasan tagar *#MeToo* sebagai advokasi mereka atas masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Jaringan secara tidak langsung terbentuk melalui peningkatan kesadaran bersama terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Pola bumerang dapat diidentifikasi ketika Gerakan *#MeToo* AS mulai bekerja secara transnasional dan terhubung dengan aktor-aktor diluar negara dan pemerintah AS untuk memperkuat tuntutan perubahan hukum domestik tersebut.

Poin utama mereka menekankan pada strategi membangun kesadaran dimana mereka mengemas sedemikian rupa isu yang diadvokasikan untuk memberikan pengaruh. Mereka mulai melakukan advokasi yang bersifat persuasif untuk mengajak orang-orang

mendukung dan setuju dengan pemahaman mereka. Inti utama advokasi mereka adalah mengubah budaya pelecehan seksual di tempat kerja yang mereka anggap tidak sesuai dengan pemahaman norma bersama mereka.

Jaringan mempromosikan konvergensi norma atau harmonisasi di tingkat regional dan internasional yang dianggap penting untuk integrasi aspek sosial dan budaya (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Konvergensi menyoroti dimensi penting yang mengarah pada sentralitas nilai-nilai atau ide-ide berprinsip (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Dengan kepercayaan bahwa individu dapat membuat perbedaan melalui informasi kreatif oleh aktor-aktor non-pemerintah, dan strategi politik yang canggih dalam menargetkan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Selanjutnya jaringan mempromosikan implementasi norma tersebut dengan menekan aktor sasaran untuk mengadopsi kebijakan baru dengan memantau kepatuhan dengan standar regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

LSM baik domestik maupun internasional memainkan peran sentral dalam TAN, di mana mereka yang memulai tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92). Dalam hal ini keaktifan para aktor yang tergabung dalam Gerakan *#MeToo* baik AS maupun global terus memperluas isu ini dengan memanfaatkan momentum tagar. Kesuksesan tagar telah mendorong mobilisasi serupa yakni munculnya Gerakan *#MeToo* secara independen di berbagai negara di mana mereka juga menyalurkan

advokasi di negaranya. Beberapa diantaranya adalah *#NiUnaMenos* di Argentina, *#BalanceTonPorc* di Perancis, *#TheFirstTimeIGotHarassed* di Mesir, *#WithYou* di Jepang, dan masih banyak lagi tersebar di negara-negara lain (MacKinnon, 2019).

Mobilisasi pada tiap-tiap negara tersebut telah menciptakan aliansi potensial lintas gerakan yang beragam untuk mengadvokasikan tujuan dari kampanye *#MeToo*. Dalam memberikan tekanan kepada negara episentrum awal gerakan, jaringan juga menargetkan suatu negara yang memiliki potensi kuat secara politik sebagai penekan dalam *boomerang pattern*. Namun dalam mengidentifikasi *state B* dalam kasus ini dapat dilihat dari tekanan secara tidak langsung yang didorong oleh meningkatnya kesadaran melalui reformasi legislatif yang terjadi di beberapa negara di luar AS sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo*. Hal ini dikarenakan upaya pengaruh gerakan melalui peningkatan kesadaran kolektif. Sehingga tuntutan gerakan tidak hanya bertujuan memengaruhi hukum pelecehan seksual di AS namun pada tiap-tiap negara dimana Gerakan *#MeToo* berkembang.

Di tingkat internasional mereka memperkuat isu dengan advokasi secara masif dan dengan bantuan media global yang mempublikasikan tindakan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran global dan mendorong banyak pihak terutama yang memiliki *power* besar untuk berinisiatif menciptakan perubahan sebagai solusi terhadap masalah yang diadvokasikan. Pada saat yang sama, pada tingkat nasional, mereka terus memperkuat klaimnya melalui advokasi

dengan membingkai isu agar menjadi diskusi nasional dan mendapatkan sorotan media. Advokasi dapat berupa meningkatnya cerita atau pengalaman yang terkait dengan pelecehan seksual ataupun kesadaran terhadap pelaporan kepada penegak hukum atas haknya, hingga audiensi yang diadakan oleh para aktivis untuk mendiskusikan masalah. Ketika masalah semakin sering di publikasi maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut memajukan isu dan tuntutan perubahan. Akibatnya beberapa negara di mana mobilisasi Gerakan *#MeToo* berkembang telah mengalami reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja.

Reformasi legislatif telah terjadi di berbagai negara sebagai dampak meluasnya eksistensi Gerakan *#MeToo* (Stone & Vogelstein, 2019). Di Perancis, RUU tentang pelecehan seksual yang lebih komprehensif telah disahkan pada Agustus 2018 (Stone & Vogelstein, 2019). Bahkan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja seperti Tiongkok dan Jepang juga telah merumuskan kebijakan untuk menanggapi hal tersebut (Stone & Vogelstein, 2019).

Meningkatnya reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja di berbagai negara telah menunjukkan keberhasilan pengaruh Gerakan *#MeToo* dalam membangun kesadaran bersama dan mengubah perilaku negara. Hal ini tentu menciptakan resonansi bagi AS untuk turut mereformasi undang-undangnya sebagai negara titik awal di mana Gerakan *#MeToo* bermula. Hal ini secara tidak

langsung dapat menekan pemerintah AS ketika kesadaran mengenai masalah tersebut telah menciptakan gelombang untuk merespons dengan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif.

Jaringan #MeToo global terus memperkuat pengaruh tidak hanya pada suatu negara tertentu sebagai penekan, namun juga dengan cara lain melainkan dengan mencari dukungan oleh *intergovernmental organization* yang dianggap kuat secara politik. Hal ini tentunya sebuah strategi yang disebutkan dalam *boomerang pattern* untuk memberikan tekanan kepada negara target yakni melalui tekanan dari *intergovernmental organizations* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Jaringan akan berusaha untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap target tindakan mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Mereka mulai mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membujuk negara atau organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Misalnya menekan negara-negara bagian atau organisasi internasional untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98).

Dalam kasus ini, *Intergovernmental organizations* yang paling memungkinkan adalah PBB, dimana badan PBB yang paling kompatibel terhadap masalah ini adalah ILO (*International Labour Organizations*). Disaat yang bersamaan dengan meluasnya kesadaran terhadap pelecehan seksual di tempat kerja juga telah memengaruhi

internal organisasi PBB. Gerakan *#MeToo* telah berdampak pada peningkatan laporan pelecehan seksual di arena internal PBB sendiri (Vogelstein, 2018). Kesadaran tercipta di dalam internal PBB di mana Sekretaris Jenderal PBB António Guterres membentuk gugus tugas pelecehan seksual untuk meninjau dan meningkatkan kebijakan PBB (Vogelstein, 2018). Upaya membangun kesadaran bersama terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja oleh jaringan terus mengalami kemajuan ditandai dengan diadakannya konvensi atas inisiatif ILO (Stone & Vogelstein, 2019).

ILO mengadakan pertemuan dalam *International Labour Conference* (ILC) dan menghasilkan konvensi baru dan rekomendasi PBB untuk memerangi pelecehan seksual di dunia kerja (ILO, 2019). ILC mengadakan pertemuan tiap tahun di bulan Juni, di mana inisiatif dalam mendiskusikan masalah ini pertama kali dilakukan pada Juni 2018 di sesi ke-107 ILC (ILO, 2019). Namun konferensi tersebut baru menghasilkan teks yang diusulkan untuk konvensi dan rekomendasi mengenai penetapan standar untuk mengakhiri pelecehan seksual di tempat kerja (ILO, 2019). Dilanjutkan pada tahun setelahnya pada Juni 2019, sesi ke-108 ILC kembali diadakan untuk mendiskusikan keberlanjutan penetapan standar hukum internasional tersebut.

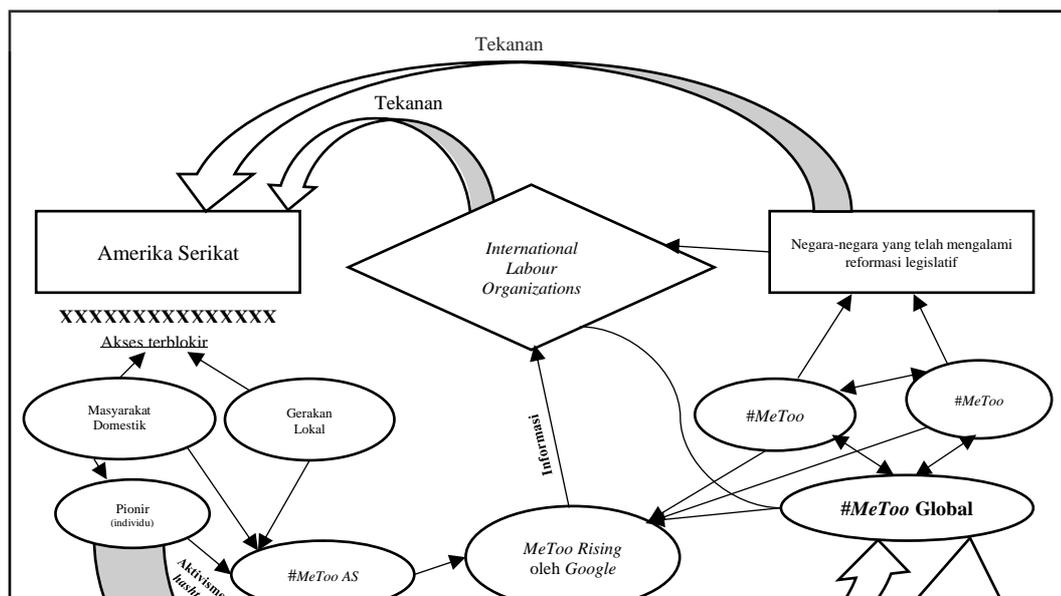
Pertemuan ini berhasil mengadopsi '*The Violence and Harassment Convention 2019*', dan '*Violence and Harassment Recommendation 2019*' pada tanggal 21 Juni 2019 melalui *The Centenary International Labour Conference*, di Geneva (ILO, 2019).

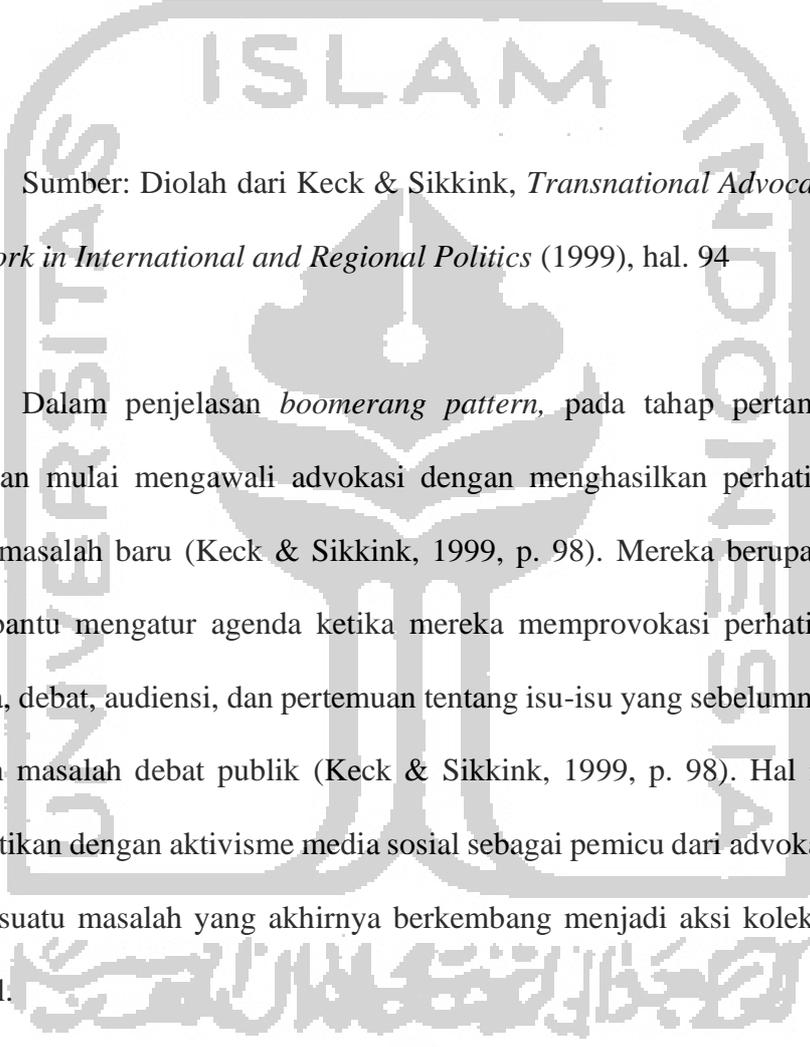
Upaya penetapan preseden internasional baru ini akan menyerukan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi pelecehan seksual (Stone & Vogelstein, 2019). Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, ILO akan mengharuskan negara-negara anggotanya mengadopsi undang-undang yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

Dengan berhasilnya ILC dalam mengadopsi *Convention* 190 dan *Recommendation* 206 menghasilkan resolusi bahwa negara-negara anggota harus segera meratifikasinya. Hal ini merupakan upaya yang akan mendesak pemerintah AS yang merupakan anggota ILO untuk turut mereformasi undang-undangnya yang mengatur tentang masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Sehingga *boomerang pattern* dalam kasus ini ditunjukkan dalam keberhasilan Gerakan #MeToo secara kolektif baik AS maupun global dalam memengaruhi kesadaran ILO, yang kemudian mendorong tekanan ILO terhadap AS sebagai *State A*. Pola bumerang berdasarkan aktivisme Gerakan #MeToo dapat dilihat melalui gambar 2.

Gambar 2. Boomerang Pattern dalam Aktivisme TAN

Gerakan #MeToo





Sumber: Diolah dari Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics* (1999), hal. 94

Dalam penjelasan *boomerang pattern*, pada tahap pertama, jaringan mulai mengawali advokasi dengan menghasilkan perhatian pada masalah baru (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Mereka berupaya membantu mengatur agenda ketika mereka memprovokasi perhatian media, debat, audiensi, dan pertemuan tentang isu-isu yang sebelumnya bukan masalah debat publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Hal ini dibuktikan dengan aktivisme media sosial sebagai pemicu dari advokasi awal suatu masalah yang akhirnya berkembang menjadi aksi kolektif global.

Pada tahap kedua, jaringan mulai mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membantu membujuk negara dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Misalnya menekan negara-negara bagian atau organisasi

internasional untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98).

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Gerakan #MeToo dalam upaya membangun kesadaran dalam memengaruhi ILO untuk berinisiatif menciptakan standar hukum internasional tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Standar hukum internasional ini tentu akan menjadi penekan bagi AS untuk melakukan reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja. Amerika Serikat sebagai salah satu bagian dari anggota ILO dan di sisi lain merupakan pemicu awal Gerakan #MeToo tentunya akan terdesak dengan hal tersebut.

Komitmen global yang ditunjukkan melalui diadopsinya *Convention 190* dan *Recommendation 206* dilanjutkan dengan resolusi pertama untuk mengundang negara-negara anggota meratifikasi konvensi tersebut. Namun adopsi *Convention 190* tersebut belum ada negara anggota yang meratifikasi termasuk Amerika Serikat sendiri. Sehingga analisis *boomerang pattern* ini berhenti pada tekanan ILO terhadap AS melalui desakan bagi negara-negara anggota untuk meratifikasi konvensi penghapusan pelecehan seksual di dunia kerja tersebut. Konvensi belum dapat diberlakukan sebelum minimal di ratifikasi oleh dua negara anggota. Hal ini tentunya belum dapat secara kuat mendorong AS untuk mematuhi standar hukum yang dibuat tersebut karena belum resmi diberlakukan. Sehingga pola bumerang dalam kasus ini belum berhasil secara keseluruhan untuk mendesak AS

mereformasi hukumnya agar disesuaikan dengan standar hukum internasional tersebut.

2.2. *Political Entrepreneurs* dalam Aktivisme Gerakan

***#MeToo* Amerika Serikat**

Sebuah norma ataupun nilai dalam masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, begitu pula dengan suatu isu tertentu yang mengandung norma atau nilai tentu memiliki pemicu atau pencetusnya. Aktivis merupakan orang yang cukup peduli dengan beberapa masalah tertentu, dimana mereka akan antusias untuk bertindak dalam mencapai tujuan mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka akan memajukan klaim terhadap isu tertentu yang menjadi perhatian mereka. Keck & Sikkink menyebut mereka sebagai '*political entrepreneurs*' sebagai orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali dimana mereka juga yang menjadi aktor dalam proses kemunculan suatu isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka menyerukan perhatian terhadap sebuah masalah tertentu yang mengandung norma atau nilai-nilai tertentu yang seringkali bersifat persuasif untuk memperluas jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Isu pelecehan seksual di tempat kerja yang dimajukan dalam kasus tagar *#MeToo* menjadi perhatian dunia dengan menggarisbawahi masalah perempuan dalam lingkungan pekerjaan. Pengaturan budaya dan norma-norma yang mengarah pada klaim pelecehan seksual di tempat kerja bagi perempuan cenderung memiliki sedikit resonansi di

antara masyarakat domestik. Pelanggaran ini pada dasarnya umum terjadi, namun akses masyarakat untuk melaporkan kepada penegak hukum dimungkinkan terhambat oleh beberapa faktor tertentu.

Dalam sebuah survei nasional AS yang meneliti mengenai keengganan orang Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerjanya menghasilkan dua faktor (Hart, 2019). *Pertama*, risiko karier di mana orang-orang enggan melaporkan karena hal tersebut akan membuat karier mereka terancam (Hart, 2019). Hambatan yang menunjukkan masalah ini sebagian besar dialami perempuan yang seringkali inferior di dalam dunia pekerjaan yang masih didominasi oleh laki-laki. *Kedua*, budaya atau stigma orang Amerika terhadap korban pelecehan seksual adalah buruk secara sosial atau cenderung menyalahkan korban (Hart, 2019). Faktor dimana budaya dan norma yang berkembang di masyarakat bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan masalah yang mempermalukan untuk dipublikasikan.

Meskipun masalah pelecehan seksual telah memiliki legitimasi sendiri bagi korban untuk melaporkan, budaya dan norma yang berkembang di masyarakat tidak memberikan dukungan bagi korban. Akibatnya sebagian besar korban pelecehan seksual, khususnya perempuan di tempat kerjanya tidak melaporkan pelanggaran tersebut. Aktivisme media sosial kemudian dikembangkan oleh seorang aktor yang pertama kali memprovokasi masalah agar menjadi perhatian publik. Dengan bantuan aktivis lainnya yang juga aktif dan perhatian dengan masalah pelecehan seksual di tempat kerja tersebut telah

mendorong terciptanya koneksi untuk membicarakan pandangan yang sama terhadap masalah ini.

Orang-orang yang menjadi pelopor tersebut dapat dikatakan sebagai '*political entrepreneurs*' dimana mereka aktif memperjuangkan advokasi yang mengandung nilai atau norma tertentu (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Isu-isu berbasis nilai-nilai dan norma seperti isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, pelecehan seksual dan lain sebagainya, dapat mendorong masyarakat di berbagai penjuru dunia membangun satu kesamaan cara pandang mengenai isu tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam bagian ini penelitian akan mencoba menganalisa beberapa aktor atau aktivis yang memenuhi spesifikasi sebagai '*political entrepreneurs*' menurut TAN dalam aktivisme Gerakan #MeToo AS.

Pada aktivisme Gerakan #MeToo ini, *political entrepreneurs* merupakan para aktor baik individu maupun organisasi yang menjadi *networker* inti dari aksi kolektif ini. Mereka aktif mengadvokasikan #MeToo agar mencapai tujuan dari gerakan untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi Alyssa Milano dan Tarana Burke sebagai individu yang dapat dikatakan sebagai *political entrepreneurs* dalam studi kasus Gerakan #MeToo. Keduanya merupakan aktivis yang menjadi bibit terciptanya jaringan dimana mereka telah berupaya memajukan misi dan kampanye melawan pelecehan seksual di AS dengan cara-cara mereka.

Aktivis atau '*political entrepreneurs*' percaya bahwa jejaring akan memajukan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikannya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam jaringan advokasi transnasional, pelaku jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam debat kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Aktor yang visioner akan muncul dan mengusulkan strategi untuk aksi politik di sekitar masalah yang tampaknya tidak terselesaikan, potensi berubah menjadi jaringan aksi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Aktivis atau *political entrepreneurs* merupakan bagian dari seorang aktor yang berperan dalam *boomerang pattern* di atas.

Alyssa Milano merupakan aktor utama yang berupaya memprovokasi masalah pelecehan seksual yang dialaminya untuk mendorong para korban lainnya yang mungkin terhambat untuk bersuara dan mengungkapkan. Ia merupakan pelopor yang mencetuskan isu dengan membawa masalah pelecehan seksual khususnya di tempat kerja yang sebelumnya masalah ini mengandung konotasi negatif di arena masyarakat AS. Budaya dan norma yang berkembang di masyarakat terhadap masalah ini cenderung negatif untuk dipublikasikan sehingga kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan pemerintah. Sebagai orang yang memiliki kesadaran tinggi untuk melawan masalah pelecehan seksual yang berkembang di masyarakat, Milano memiliki inisiatif agar masalah ini diperhatikan lalu ditangani dan dicegah.

Upaya yang dilakukannya untuk melawan norma yang menurutnya tidak sesuai akhirnya dilakukan dengan advokasi mencari dukungan melalui *platform* media sosialnya. Akibatnya budaya pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja berhasil meningkat di Amerika Serikat pasca tagar *#MeToo* meluas melalui kecepatan media sosial. Milano dapat dikatakan sebagai '*political entrepreneurs*', dimana ia berhasil mengubah stigma buruk masyarakat yang sebelumnya cenderung menyalahkan para korban pelecehan seksual. Ia merupakan promotor utama yang mendorong meningkatnya kesadaran terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Norma masyarakat yang menjatuhkan korban telah berbalik untuk mendukung korban pelecehan seksual dan membuat para korban mulai berani untuk mengungkapkan.

Isu berbasis norma dalam kasus *#MeToo* telah menciptakan pertumbuhan koneksi antara orang-orang yang antusias memperhatikan masalah ini dan mendorong tindakan bersama. Kampanye melawan pelecehan seksual akhirnya mulai terbangun, dimana jaringan mulai tercipta dan dikenal dengan *#MeToo Movement* yang meluas secara global. Para aktivis terus aktif mengadvokasikan isu secara persuasif untuk mendorong pertumbuhan jaringan dan dukungan lebih besar lagi. Jaringan membiakkan jaringan, dimana mereka menjadi repertoar tindakan yang tersebar secara transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam bidang isu ini, partisipasi jaringan transnasional telah menjadi komponen penting dari identitas kolektif para aktivis yang

terlibat (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Disinilah pemicu awal bagaimana jaringan terbentuk melalui pandangan yang sama terhadap isu berbasis norma yang di provokasi oleh ‘*political entrepreneurs*’.

Di sisi lain, Tarana Burke turut menjadi sorotan media nasional setelah diketahui bahwa ia telah mendirikan “*MeToo Movement*” yang merupakan sebuah gerakan akar rumput sejak tahun 2006 di Alabama, AS (Carlsen, et al., 2018). Burke juga dapat dikatakan sebagai salah satu *political entrepreneurs* dimana ia telah membangun landasan dari gerakan melawan pelecehan seksual di AS. Meskipun pada waktu itu gerakan hanya berfokus pada penanganan para penyintas pelecehan seksual dari kalangan wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019).

Hal ini telah membuktikan bahwa Burke merupakan orang yang visioner terhadap masalah pelecehan seksual dan telah memiliki upaya untuk merubah pandangan dan norma yang salah tersebut melalui gerakan lokal yang didirikannya. Meskipun pada waktu itu gerakan belum memiliki pengaruh besar seperti saat ini setelah mempengaruhi dunia tempat kerja melalui *hashtag* #MeToo oleh Milano, ‘*MeToo Movement*’ telah menjadi fondasi dari Gerakan #MeToo AS. Pada akhirnya Gerakan *MeToo* setelah #MeToo mulai dikembangkan kembali dalam website resmi *MeToo Movement* oleh Tarana Burke dengan slogan “*you are not alone, Me Too*” (MeToo Movement, 2019).

Burke sebagai aktivis yang menjadi sorotan publik saat ini terus melanjutkan uoaya advokasi melalui *website* resminya untuk tetap

memperkenalkan Gerakan dan tujuan dari gerakan. Dalam *website* resminya, *MeToo Movement* memberikan informasi sumber daya nasional dan organisasi lokal yang turut menjadi advokat dalam menangani masalah seputar pelecehan seksual di tempat kerja domestik AS (MeToo Movement, 2019). Sumber daya nasional tersebut menawarkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual termasuk sumber daya hukum domestik AS (MeToo Movement, 2019). Beberapa sumber nasional tersebut adalah *The National Sexual Violence Resource Center (NSVRC)*, *American Civil Liberties Union (ACLU)*, *National Women's Law Center (NWLC)*, *Time's Up Legal Defense Fund* dan sumber-sumber nasional lainnya yang tersedia di arena domestik AS (MeToo Movement, 2019).

Di sisi lain, dengan meluasnya kesadaran akan masalah ini telah mendorong lebih banyak organisasi lokal yang menjadi mitra gerakan untuk turut menjadi advokat dan bagian dari Gerakan *#MeToo*. Mereka aktif melakukan advokasi di arena domestik untuk menunjukkan urgensi dari masalah yang diadvokasikan dan mendorong tuntutan perubahan hukum atas masalah tersebut. Berbagai organisasi lokal yang tergabung dalam aktivisme ini menyediakan berbagai sumber layanan bagi para penyintas untuk memberikan dukungan terhadap mereka (MeToo Movement, 2019). Beberapa diantaranya adalah; *2nd Chance, Inc.*; *360 Communities Sexual Assault Services*; *Abuse and Rape Crisis Center*; *Advocacy & Resource Center*; dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh negara bagian AS untuk menyediakan layanan yang

berkaitan dengan advokasi Gerakan *#MeToo* (MeToo Movement, 2019). Sekumpulan organisasi dan gerakan lokal ini terdiri dari orang-orang dengan posisi berbeda-beda dan terhubung dalam satu pandangan yang sama terhadap suatu isu dan turut aktif memperjuangkan isu tersebut.

Baik Burke maupun Milano, keduanya sesuai untuk dikatakan sebagai *'political entrepreneurs'*. dimana keduanya merupakan penggerak isu utama dan pencetus norma untuk pertama kalinya agar menjadi perhatian nasional. Keck & Sikkink mendefinisikan *'political entrepreneurs'* sebagai orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali dimana mereka juga yang menjadi aktor dalam proses kemunculan suatu isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Keck & Sikkink juga mendefinisikan *'political entrepreneurs'* bagi aktivis yang aktif mempromosikan dan memajukan misi dan kampanye melalui jejaring untuk menguatkan isu mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam hal ini, Milano dan Burke sebagai *'political entrepreneurs'* terus memperkuat advokasi mereka melalui *website* resmi dan aktif mengadakan audiensi yang membahas keberlanjutan gerakan untuk mendapatkan sorotan media lebih besar lagi. Mereka menjadi sumber informasi utama dari aktivisme Gerakan *#MeToo* nasional AS.

Di sisi lain, melalui posisinya sebagai selebriti, Milano berupaya mengumpulkan orang-orang *Hollywood* untuk turut mendukung kampanye *#MeToo* yaitu melalui terbentuknya Gerakan *#Time's Up*. Gerakan ini merupakan langkah untuk melanjutkan kampanye *#MeToo*

yang beranggotakan selebriti *Hollywood* (Langone, 2018). Dengan menargetkan arena selebriti *Hollywood*, Milano telah secara aktif mencari peluang untuk mendapatkan sorotan media agar isu ini semakin menjadi berita arus utama. *Political entrepreneurs* dalam jaringan advokasi dapat berupa organisasi maupun individu dimana mereka memobilisasi sumber daya seperti informasi dan keanggotaan, serta memikirkan struktur peluang politik di mana mereka harus beroperasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91)

Sentralitas pada nilai-nilai atau ide-ide berprinsip adalah dimensi penting jaringan, di mana individu dipercaya dapat membuat perbedaan, melalui pertukaran informasi dan penggunaan aktor-aktor non-pemerintah sebagai strategi politik dalam kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Gerakan *Time's Up* juga merupakan bagian dari Gerakan *#MeToo* di mana organisasi ini juga menunjukkan kesadaran untuk meningkatkan hukum pelecehan seksual di tempat kerja dengan turut mengadvokasikan *#MeToo*. Hal ini dibuktikan dengan upaya gerakan dalam mengumpulkan dana hukum dalam '*Time's Up Legal Defense Fund*' yang dikelola di bawah administrasi *National Women's Law Center* (Langone, 2018).

Dana hukum ini diperuntukkan bagi orang-orang di seluruh industri terutama pada industri rendah untuk mendapatkan akses ke sistem hukum (Langone, 2018). Gerakan bekerjasama dengan beberapa advokat terkemuka untuk kesetaraan dan keselamatan di tempat kerja untuk meningkatkan undang-undang dan kebijakan perusahaan untuk

memerangi pelecehan seksual di tempat kerja (Langone, 2018). Aktivis inti atau '*Political entrepreneurs*' akan terus aktif dalam memobilisasi sumber daya seperti informasi dan keanggotaan dalam jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Mereka menunjukkan kesadaran penuh tentang struktur peluang politik di mana mereka beroperasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Para aktivis yang disebut sebagai '*political entrepreneurs*' ini merupakan *networkers* inti dalam kampanye isu yang diadvokasikan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Biasanya mereka merupakan orang yang telah mengenal jauh dan bahkan mendapatkan pengalamannya sendiri terhadap suatu masalah yang menjadi advokasi mereka tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan begitu, isu atau norma yang mereka cetuskan tersebut akan tersebar dan mulai diyakini oleh orang lain (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Tujuan akhir dari jaringan adalah bahwa isu akan diadaptasi menjadi sebuah norma yang disepakati oleh negara melalui upaya advokasi jaringan. Singkatnya, aktivis mencetuskan norma yang dimajukan untuk mendapatkan perilaku kolektif dan pada akhirnya memberikan efek konstitutif bagi negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

2.3. *International Conference and Organizations yang Mendukung Aktivisme Transnasional Gerakan #MeToo Amerika Serikat*

Poliferasi organisasi dan konferensi internasional saat ini telah menyediakan peluang akses yang lebih besar bagi jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan keaktifan dari para aktivis jaringan, mereka akan berupaya keras dalam menemukan tempat-tempat yang potensial untuk mengejar klaim mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pada akhirnya mereka akan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional maupun konferensi internasional yang memiliki fokus yang sama dengan isu yang mereka advokasikan untuk memperluas kontak internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Akses jaringan melalui kontak internasional inilah yang merupakan faktor selanjutnya yang mendukung terbentuknya TAN setelah aktivis secara aktif mengadvokasikan isu (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Gerakan *#MeToo* terbentuk oleh sebuah momentum yang berskala global tentunya para aktivis yang terlibat dalam jaringan akan memanfaatkan momentum ini. Baik aktivis yang merupakan *political entrepreneurs* maupun aktivis lainnya yang terlibat dengan jaringan *#MeTo*, tentunya akan mencari koneksi lebih banyak ke saluran internasional mengetahui bahwa *#MeToo* sendiri tengah menjadi perbincangan global.

Tentunya organisasi-organisasi maupun gerakan internasional lainnya yang memiliki perhatian sama terkait isu pelecehan seksual di

tempat kerja sedang melakukan diskusi untuk membahas *#MeToo*. Terbukti pasca *#MeToo* meluas di berbagai negara, konferensi internasional maupun domestik pada beberapa negara yang membahas mengenai *#MeToo* mulai bermunculan. Hal ini menjadi peluang bagi para aktivis Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat untuk mencari koneksi internasional agar bersama-sama mencari solusi terkait masalah global ini termasuk masalah bagi domestik Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* telah dikenal secara global sebagai kampanye memerangi pelecehan seksual di tempat kerja di mana kasus ini banyak dialami oleh perempuan. Beberapa badan organisasi maupun gerakan yang memiliki perhatian terhadap masalah tersebut mulai memperlihatkan eksistensi mereka untuk turut menyuarakan hal tersebut. Mereka secara kolektif terdiri dari berbagai organisasi yang bergerak secara internasional dari organisasi yang berbasis perempuan hingga organisasi berbasis hak asasi manusia di dunia kerja. Masalah mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah global yang dialami tidak hanya satu atau dua negara, sehingga memungkinkan banyaknya pihak yang mengadakan konferensi untuk berdiskusi terkait masalah ini.

Melalui perluasan kesadaran bersama tentunya masalah global ini semakin diperhatikan oleh organisasi-organisasi besar di dunia untuk mencari solusi bersama. Salah satu contoh bentuk kesadaran yang paling menonjol di antara aktor-aktor ini adalah ILO, yang menyediakan wadah diskusi Gerakan *#MeToo* melalui pertemuan dalam *International*

Labour Conference (ILC). Pasca momentum *#MeToo*, pertemuan ILC yang diadakan tiap tahun pada bulan Juni mulai mendiskusikan tantangan *#MeToo* dalam dunia kerja. ILO bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap dunia pekerjaan secara global, sehingga kekerasan dan pelecehan di dunia kerja merupakan tantangan bagi tujuannya tersebut. Mulai tahun 2018, konferensi ILC membuka diskusi yang menunjukkan upaya ILO dalam menciptakan standar yang mendefinisikan ‘kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja’ untuk mencegah dan mengatasinya.

Kesadaran global terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja yang diadvokasikan Gerakan *#MeToo* telah memengaruhi organisasi yang memiliki *power* besar di arena internasional. Konferensi yang diadakan atas inisiatif ILO telah memberikan peluang bagi Gerakan *#MeToo* untuk memperkuat klaimnya dan mengejar tujuannya. Dalam setiap konferensi ILC, tiap negara memiliki empat representatif yaitu dua delegasi pemerintah, satu delegasi pengusaha, dan satu delegasi pekerja, dan para penasehat masing-masing (ILO, 2019). Delegasi AS diwakili oleh empat representatif wajib dengan kurang lebih 40 penasehat keseluruhan yang sebagian besar merupakan pekerja (ILO, 2019).

ILC pada Juni 2018 merupakan sesi ke-107 menghasilkan teks yang diusulkan untuk konvensi dan rekomendasi mengenai penetapan standar untuk mengakhiri pelecehan seksual di tempat kerja (ILO, 2019). Dilanjutkan pada tahun setelahnya pada Juni 2019, sesi ke-108

ILC kembali diadakan untuk mendiskusikan keberlanjutan penetapan standar hukum internasional tersebut (ILO, 2019). Pada konferensi ke-108 ini, delegasi Amerika Serikat sendiri turut berpartisipasi dalam pemungutan suara di mana pada bagian konvensi keempat delegasi AS menyetujui adopsi tersebut (ILC, 2019). Sedangkan dalam pemungutan suara terhadap rekomendasi, hanya delegasi pekerja yang menyetujui sedangkan delegasi tiga lainnya golput (ILC, 2019). Berdasarkan hasil suara keseluruhan negara anggota, ILC berhasil mengadopsi *'The Violence and Harassment Convention 2019'*, atau *Convention 190* dan *'Violence and Harassment Recommendation 2019'* atau *Recommendation 206* pada tanggal 21 Juni 2019 (ILO, 2019).

Konvensi ini merupakan langkah ILO dalam merespons masalah global yakni pelecehan seksual di tempat kerja dengan menciptakan standar hukum internasional sebagai upaya penanganan global. Kedua pencapaian adopsi tersebut telah dimasukkan ke dalam resolusi ILO dalam rangka penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Resolusi berupa; mengundang negara-negara anggota untuk meratifikasi Konvensi; mengundang pemerintah, untuk berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja untuk mengimplementasikan konvensi dan rekomendasi tersebut; dan mengundang Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional untuk meminta Direktur Jenderal untuk mengembangkan strategi komprehensif untuk ratifikasi luas Konvensi Kekerasan dan Pelecehan 2019 dan implementasinya (ILC, 2019). Berdasarkan tahapan saat ini, resolusi tersebut belum berjalan

karena belum ada negara anggota yang meratifikasi *Convention 190* (ILO, 2019). Untuk mencapai diberlakukannya resolusi ini mengharuskan minimal dua negara anggota untuk meratifikasi standar hukum tersebut (ILO, 2019). Namun dalam hal ini, ILO telah memiliki kontribusi besar untuk menciptakan langkah global untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di tempat kerja yang diadvokasikan oleh Gerakan *#MeToo*.

ILO merupakan salah satu organisasi internasional berpengaruh di dunia yang memiliki perhatian yang sama dengan Gerakan *#MeToo* terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. ILO dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang berkontribusi dalam aktivisme transnasional Gerakan *#MeToo* AS, dimana mereka telah menyediakan peluang untuk memperkuat Gerakan *#MeToo* melalui konferensi internasional. Konferensi internasional dan bentuk-bentuk kontak internasional lainnya telah menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Gerakan *#MeToo* terus berupaya secara transnasional dalam memperkuat advokasi untuk menyentuh kesadaran organisasi yang memiliki potensi politik besar dan kuat. Aktivis jaringan kreatif dalam menemukan tempat-tempat baru untuk mengejar klaim mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Poliferasi organisasi dan konferensi internasional telah memberikan peluang besar bagi terciptanya kontak internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pada bab selanjutnya, skripsi ini akan

membahas lebih lengkap mengenai taktik Gerakan #MeToo dalam upaya mencapai tujuan dari gerakan itu sendiri.



BAB III

TAKTIK GERAKAN #METOO AS DALAM MENCAPAI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERHADAP HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT

3.1. Taktik Gerakan #MeToo AS Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori *Transnational Advocacy Network*

Dalam memperjuangkan tuntutan perubahan hukum pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari Gerakan #MeToo AS, mereka melakukan berbagai upaya melalui aktivisme transnasionalnya. Gerakan #MeToo AS dan mobilisasi serupa gerakan ini di seluruh dunia telah menunjukkan eksistensi mereka sebagai aktor yang berpengaruh dalam politik internasional. Jaringan advokasi transnasional yang terbentuk melalui pertukaran informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap meluasnya kesadaran global akan masalah ini. Tujuan utama dari TAN adalah mengubah perilaku negara sesuai dengan klaim seputar isu yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Jaringan transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, sehingga mereka tidak menggunakan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, *'informations politics'* yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Kedua*, *'symbolic Politics'* yaitu kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Ketiga, *'leverage politics'* yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Keempat*, *'accountability politics'* yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan aktivisme jaringan untuk mencapai tujuan perjuangannya. Pada bagian ini, penulis berusaha mengidentifikasi berdasarkan tipologi taktik yang digunakan oleh aktivisme Gerakan *#MeToo* menyempitkan fokus terhadap Gerakan *#MeToo* AS dalam upaya memengaruhi perilaku negara untuk mereformasi undang-undangnya dalam

menangani pelecehan seksual di tempat kerja yang lebih solutif. Berikut merupakan analisa taktik gerakan yang dikelompokkan berdasarkan tipologi taktik TAN.

3.1.1. *Information Politics*

Mobilisasi Gerakan *#MeToo* berlangsung secara bersamaan di seluruh dunia melalui momentum tagar sehingga menyebabkan aktivisme transnasional terjadi sangat cepat dan kompleks. Momentum Gerakan *#MeToo* global merupakan aksi kolektif dari eksistensi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara termasuk di AS sendiri. Mereka menjadi bagian dari gerakan melalui informasi dasar yang mereka dapatkan melalui *platform* media sosial. Isu normatif telah membangun kesadaran dan pemahaman bersama terhadap isu tersebut. Mereka berjuang melawan pelecehan seksual di tempat kerja untuk memengaruhi perubahan legislatif di negaranya masing-masing. Peran sentral informasi dalam semua masalah ini membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Jaringan adalah struktur komunikatif (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Sehingga informasi memiliki peran sentral dalam memperkuat jaringan dan sangat penting untuk efektifitas jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). '*Informations Politics*' adalah kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Pertukaran informasi yang kompleks di antara jaringan merupakan taktik utama dalam memperkuat jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Informasi sangat penting bagi perantara terhubungnya Gerakan *#MeToo* di berbagai negara. Mobilisasi Gerakan *#MeToo* di seluruh dunia tercipta melalui peranan media sosial, yang juga di dorong oleh kontribusi besar dari media

internasional dalam mempublikasikan hal tersebut. Media merupakan mitra penting dalam politik informasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Namun, dorongan liputan media dan perluasan melalui media sosial saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana orang-orang termotivasi untuk melakukan tindakan kolektif terhadap isu tersebut.

Dalam hal ini, advokasi awal #MeToo berawal dari seorang individu yang sengaja membagikan kisah pengalaman pelecehan seksualnya sendiri di media sosial dan mengajak orang lain yang mengalami untuk berani mengungkapkan. Aliran informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta, tapi juga kesaksian cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang mengalami masalah yang akan diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Dengan menafsirkan fakta dan kesaksian, kelompok aktivis mbingkai isu dalam konteks benar atau salah untuk mempersuasi dan menstimulasi masyarakat untuk bertindak dan memberikan dukungan atas isu yang diperjuangkan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Ini merupakan penggunaan informasi testimonial untuk mencapai informasi teknis atau statistik (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Tanpa adanya kasus-kasus individual, para aktivis tidak dapat memotivasi orang untuk turut menuntut perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Advokasi secara persuasif mempublikasikan berbagai cerita-cerita kisah nyata yang berkaitan dengan pengalaman pelecehan seksual oleh para penyintas. Melalui *platform* Twitter, para penyintas pelecehan seksual turut memberanikan diri untuk membagi kisah-kisah mereka dimana sebelumnya mereka tidak memiliki akses (Lakritz, 2018). Dengan meningkatnya perhatian publik akan mendorong media untuk menyoroti hal tersebut. Para aktor atau kelompok aktivis akan

berupaya menjangkau audiens yang lebih luas dengan menarik perhatian pers, termasuk jurnalis yang simpatik dan mungkin menjadi bagian dari jaringan akan membantu mengemas informasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

TAN merupakan aktor non-negara sehingga mereka tidak memiliki akses politik resmi seperti negara, sehingga mereka tidak memiliki *power* secara tradisional seperti militer maupun ekonomi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Akibatnya mereka harus mencari cara agar isu mereka mendapat perhatian dan masuk menjadi agenda pembahasan aktor-aktor yang memiliki akses institusional tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Mereka berupaya dengan melakukan advokasi, di mana para aktor dalam jaringan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat serta membagikannya secara efektif (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

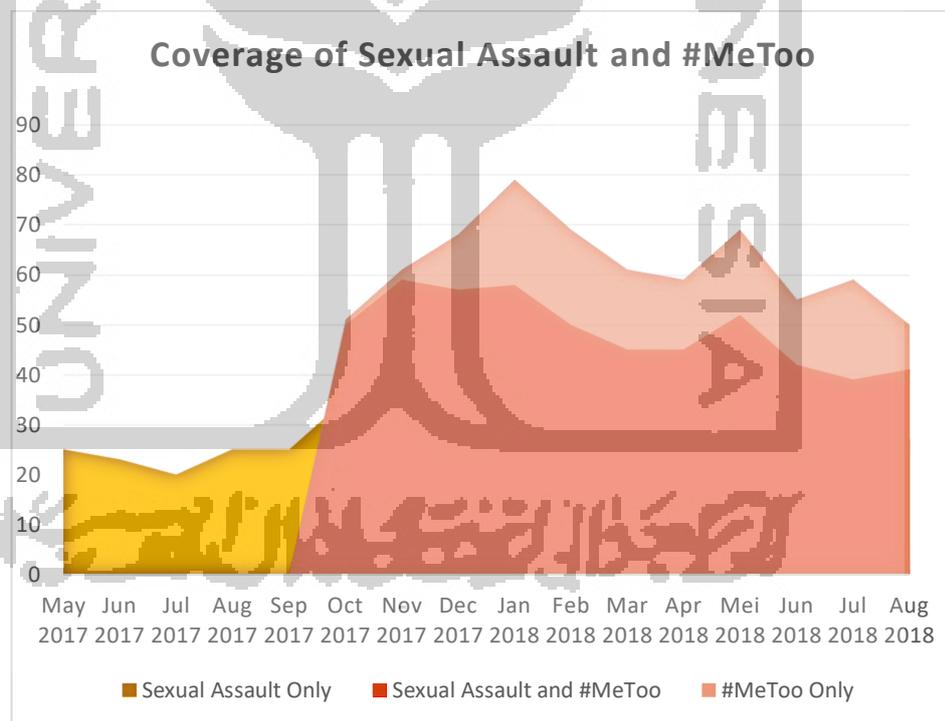
Media nasional pada tiap-tiap negara akhirnya mulai menyoroti permasalahan ini untuk menunjukkan dampak Gerakan *#MeToo* pada masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya dukungan masyarakat dalam meyarakan *#MeToo* baik melalui media sosial, pelaporan hukum ataupun audiensi yang diadakan oleh para aktivis. Di Amerika Serikat, peranan media nasional sangat besar terutama media-media terkemuka AS yang potensial untuk di akses orang-orang di seluruh dunia. Terutama *The New York Times* yang mempublikasikan *#MeToo* pertama kali melalui berita Alyssa Milano dan Harvey Weinstein sebagai sorotan.

Kekuatan *#MeToo* telah menciptakan timbal balik liputan media dan tindakan masyarakat dalam berbicara lebih banyak tentang pelecehan seksual di tingkat domestik. Keberadaan tagar telah mendorong banyak orang untuk berbicara

mengenai pelecehan seksual baik secara *online* maupun dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong liputan media (Ennis & Wolfe, 2018). Sebaliknya, liputan media memberikan informasi mengenai masalah tersebut dan mendorong lebih banyak orang lagi untuk turut berbicara mengenai pelecehan seksual (Ennis & Wolfe, 2018).

Pasca *#MeToo*, penelitian oleh *Women's Media Center* meneliti proporsi liputan mengenai pelecehan seksual di media nasional AS meningkat dan tren ini sebagian besar dikaitkan dengan Gerakan *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Temuan ini ditunjukkan dalam grafik 3.1.

Grafik 1. Liputan Media tentang Pelecehan Seksual dan Gerakan *#MeToo* di Media Nasional AS



Sumber: Ennis & Wolfe, *#MeToo: The Women's Media Center Report* (2019), hal. 4

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan liputan media tentang pelecehan seksual dan Gerakan *#MeToo* pada lima bulan sebelum momentum *#MeToo* dan sepuluh bulan setelahnya. Hasil menunjukkan bahwa momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan liputan media nasional tentang pelecehan seksual terutama yang mengaitkannya dengan Gerakan *#MeToo*. Jumlah keseluruhan liputan media tentang pelecehan seksual setelah Oktober 2017 atau pasca *#MeToo* lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan sebelum Oktober 2017 (Ennis & Wolfe, 2018).

Pada bulan Oktober 2017, merupakan bulan di mana momentum *#MeToo* terjadi, peningkatan liputan media sebagian besar didorong oleh jurnalis perempuan atau editor mereka yang mengakui pentingnya masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Dengan meningkatnya rasa percaya diri para penyintas di berbagai kategori dunia kerja AS untuk mempublikasikan masalah ini, gelombang pelaporan tersebut juga memengaruhi lingkungan kerja media. Media mendapati pelaporan cerita pelecehan seksual sebanyak 1.076 dari Mei 2017 hingga Agustus 2018 (Ennis & Wolfe, 2018).

Ketika pelecehan seksual di tempat kerja menjadi diskusi nasional akibat Gerakan *#MeToo*, para jurnalis perempuan yang merupakan penyintas juga turut memberanikan diri maju ke depan (Ennis & Wolfe, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa reporter wanita berusaha lebih keras untuk membahas masalah ini dan editor menugaskan lebih banyak untuk wanita terhadap artikel atau berita yang membawa masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Gerakan *#MeToo* sendiri merupakan gerakan yang digerakkan oleh perempuan, sehingga jurnalis perempuan paling keras mengadvokasi peliputan lebih untuk masalah ini (Ennis & Wolfe, 2018). Jurnalis yang simpatik dapat menjadi bagian dari jaringan, tetapi lebih sering aktivis

jaringan memupuk reputasi untuk kredibilitas dengan pers, mereka mengemas isu untuk menarik perhatian pers (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Selain melalui media, aktivis Gerakan #MeToo terutama *networker* inti juga terus mengadvokasikan gerakan melalui informasi yang dapat di akses oleh jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tarana Burke sebagai pemimpin gerakan asli tentu menjadi pemegang kampanye inti melalui *website* resmi '*MeToo Movement*'. Setelah momentum #MeToo terjadi, *website* semakin aktif dalam membagikan informasi seputar kegiatan gerakan berupa diskusi dan pertemuan yang membahas mengenai masalah #MeToo. Di sisi lain, *website* juga menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat di akses secara umum seputar perkembangan Gerakan #MeToo di Amerika Serikat. Penyelenggara kampanye inti harus memastikan bahwa individu dan organisasi mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Dalam *website* resminya, *MeToo Movement* memberikan informasi sumber daya nasional dan organisasi lokal yang turut menjadi advokasi dalam menangani masalah seputar pelecehan seksual di tempat kerja domestik AS (*MeToo Movement*, 2019). Gerakan #MeToo tengah menjadi perhatian internasional dan nasional AS sehingga keaktifan gerakan dalam memperbarui perkembangan gerakan dan isu sangat diperlukan untuk meningkatkan intensitas perhatian publik. Pencarian utama orang-orang untuk mengetahui apa itu Gerakan #MeToo bagi mereka yang belum mengenalnya tentu akan menuju kepada *website* resmi tersebut.

Taktik berupa *information politics* dapat diidentifikasi melalui aktivisme yang dilakukan oleh para aktor Gerakan #MeToo AS dalam membingkai isu agar semakin terdengar oleh para pembuat kebijakan AS mengenai urgensi dari isu yang

diadvokasikan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan masalah pelecehan seksual, para aktivis yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah ini terus memajukan isu untuk tetap memperkuat perhatian atas isu tersebut. Mereka terus membagikan informasi yang berkaitan dengan #MeToo secara aktif terutama melalui advokasi di media sosial. Kesadaran media nasional ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat namun di negara-negara lainnya di mana mobilisasi berdampak bagi negaranya. Kontribusi masing-masing media nasional tersebut merupakan tautan yang memungkinkan gerakan saling memantau informasi dari banyak negara.

Dalam arena internasional, salah satu dukungan besar dengan meluasnya hashtag #MeToo dan meningkatnya isu ini dalam media arus utama adalah bantuan dari proyek 'Me Too Rising' oleh Google. Melalui situs web tersebut, Google memetakan informasi dengan visualisasi tren pencarian di sekitar #MeToo sejak pertama kali berita mengenai #MeToo diterbitkan pada awal Oktober oleh *The New York Times* dan *The New Yorker* (Buxton, 2018). Hal ini sehubungan dengan pengakuan dari kampanye terkait *Sexual Assault Awareness Month* di dunia (Buxton, 2018).

Tren pencarian #MeToo secara global telah meningkat dan telah dipetakan oleh *MeToo Rising* dimana akses informasi terkait perkembangan Gerakan #MeToo diseluruh dunia menjadi mudah. Perkembangan informasi yang semakin besar tentunya akan menciptakan resonansi diantara para aktor pemain politik internasional dan memengaruhi para aktor negara untuk merespons masalah ini. Aktor-aktor non-pemerintah ini akan berupaya menjadi aktor berpengaruh dalam politik internasional dengan menjadi sumber informasi alternatif (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Gerakan *#MeToo* secara global terus memperbesar perhatian untuk memengaruhi kesadaran organisasi-organisasi internasional kuat maupun negara untuk memperkuat klaim mereka. Melalui kontribusi media dalam mempublikasikan isu agar secara luas mudah di akses oleh masyarakat di seluruh dunia. Mereka menyediakan akses dan sumber informasi yang diperlukan jaringan melalui kontak dengan kelompok yang bergabung dengan jaringan yang terdapat di berbagai wilayah geografis berbeda (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Hal ini membantu memperluas legitimasi mereka, dan memobilisasi informasi di sekitar target kebijakan tertentu (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

3.1.2. *Symbolic Politics*

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalis untuk pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). '*Symbolic Politics*' ini didefinisikan dengan kemampuan untuk menggunakan simbol untuk menjelaskan peristiwa penting terkait klaim atau isu yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Aktivis Gerakan *#MeToo* dapat diidentifikasi telah menggunakan politik simbolik melalui beberapa poin diantaranya; melalui tagar *#MeToo* sebagai klaim atas masalah pelecehan seksual, dan melalui acara *Golden Globe Awards* di mana dengan menunjukkan pakaian serba hitam dan pin *Time's Up* yang dipahami sebagai solidaritas terhadap masalah pelecehan seksual di dalam negeri untuk memberikan dana hukum.

Tagar telah menjadi taktik simbolik bagi gerakan *#MeToo* di mana melalui tagar *#MeToo* telah memberikan efek terhadap meningkatnya klaim atas kasus

pelecehan seksual khususnya di AS sendiri. Tagar telah mendorong orang-orang khususnya para penyintas merasa mendapatkan dukungan terhadap pelecehan seksual yang dialaminya bahwa mereka tidak sendirian. Mereka menjadi berani membagikan kisah yang mereka alami terkait pelecehan seksual dengan menyematkan tagar. Terdorongnya para penyintas yang membagikan cerita melalui tagar telah menciptakan solidaritas antar sesama yang membawa mereka termotivasi untuk melakukan tindakan kolektif menunjukkan tingginya prevalensi kasus ini.

Tagar telah memberikan kekuatan bagi para penyintas pelecehan seksual yang sebelumnya enggan untuk mengakui karena adanya faktor penghambat seperti budaya yang cenderung menyalahkan korban dan risiko karier. Penggunaan tagar *#MeToo* telah berhasil menjadi simbol bagi isu pelecehan seksual di Amerika Serikat. Kasus pelecehan seksual menjadi tren liputan di berbagai media nasional AS, di mana artikel membahas masalah ini meningkat pasca momentum tagar. Dalam laporan *Women's Media Center*, menemukan pasca momentum *#MeToo* hingga Februari 2018, lebih dari 55 persen cerita tentang kasus pelecehan seksual di AS menyebutkan Gerakan *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Tagar *#MeToo* pada gilirannya telah menjadi simbolik untuk menyuarakan isu mengenai pelecehan seksual di tempat kerja di seluruh dunia.

Perluasan dengan simbol berupa tagar yang memiliki istilah sama dengan *'Me Too'* digunakan oleh Gerakan *#MeToo* maupun mobilisasi serupa di berbagai negara. Seperti, *#MeTooInChina* dan *#RiceBunny* di Tiongkok, *#QuellaVoltaChe* di Italia, *#YoTambien* di Spanyol, *#AnaKaman* di Arab (Adam & Booth, 2018). Di Prancis menggunakan tagar *#BalanceTonPorc*, Senegal menggunakan

#*Nopiwouma*, begitu juga Korea Selatan, Swedia, Mesir dan lainnya menggunakan bahasa kreatif mereka (Stone & Vogelstein, 2019). Tagar telah menjadi dukungan bagi para penyintas di seluruh dunia untuk berani mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Selain menggunakan tagar sebagai politik simbolik, Aktivistis Gerakan #*MeToo* AS juga berupaya memberikan dukungan bagi penyintas melalui suatu peristiwa simbolik yang menarik perhatian publik. Melalui acara *Golden Globe Awards*, para aktor Hollywood baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan solidaritas dengan memakai pakaian serba hitam (Safronova, 2018). Dengan menyematkan pin *Time's Up* hitam-putih di baju mereka sebagai aksesoris politik yang berarti melawan pelecehan seksual di tempat kerja di seluruh negeri (Safronova, 2018). *Time's Up* dalam acara ini telah memperkenalkan adanya dukungan dana hukum melalui *Times's Up Legal Defense Fund* (Safronova, 2018). Dengan politik simbolik melalui acara ini telah memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai dukungan dana hukum bagi masyarakat AS di seluruh bidang industri untuk meningkatkan laporan hukum terhadap kasus (Langone, 2018).

Penelitian *Women's Media Center* menunjukkan bahwa perhatian media cenderung meningkat ketika meliput tokoh-tokoh terkenal dan sering mengabaikan banyak kasus yang melibatkan orang biasa (Ennis & Wolfe, 2018). Sehingga untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat AS terhadap pemahaman ini, para aktor Hollywood khususnya perempuan membuat suatu peristiwa yang menjadi sorotan publik. Dunia hiburan tentunya memiliki potensi untuk menarik perhatian media nasional. Melalui peristiwa *Time's Up* tersebut telah mendorong orang-orang

terutama penyintas yang berasal dari industri rendah mendapatkan dukungan untuk melaporkan secara hukum.

Time's Up telah menjadi politik simbolik di mana efek dari pertunjukan solidaritas dalam *Golden Globe Awards* tersebut mendorong penyintas merasa memiliki kesempatan melaporkan secara hukum. Taktik politik simbolik merupakan salah satu perjuangan jaringan melalui berbagai simbol-simbol yang dapat menarik perhatian serta memberi penjelasan yang meyakinkan untuk keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Simbol-simbol ini sangat penting untuk mendukung kemajuan dan keberhasilan jaringan dimana simbol mempermudah banyak orang untuk mengenali dan mengingat suatu peristiwa tertentu.

Kemampuan Gerakan *#MeToo* AS melalui kedua politik simbolik tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi meluasnya kesadaran masyarakat untuk menunjukkan tingginya prevalensi masalah ini dihadapi. Penafsiran simbolis adalah bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi (Keck & Sikkink, 1999, p. 96). Seringkali aktivis akan mbingkai masalah dengan membawa peristiwa simbolik tertentu, dimana kasusnya banyak terjadi sehingga membuat orang untuk turut mengambil tindakan dan mendorong pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

3.1.3. Leverage Politics

Politik pengaruh adalah kemampuan jaringan dalam mencari pengaruh melalui dukungan atas aktor yang lebih kuat sebagai langkah strategis kampanye jaringan dalam mempengaruhi aktor negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dalam

suatu advokasi, aktivis dalam jaringan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang politik yakni dengan membujuk dan menekan aktor-aktor yang lebih kuat (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Jaringan akan menggunakan daya ungkit atas lembaga-lembaga yang lebih kuat untuk mendapatkan pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk memengaruhi praktik negara secara langsung (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Keck & Sikkink membagi dua jenis *leverage*, yakni; *moral leverage*, dan *material leverage* (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Pengaruh moral cenderung mengarah pada “*mobilization of shame*”, terhadap perilaku aktor-aktor sasaran sebagai pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Sedangkan pengaruh material dapat berupa uang, barang, atau berbagai bentuk keuntungan lainnya yang biasanya mengarah pada tautan isu ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan militer ataupun hubungan diplomatik (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Taktik *leverage politics* dalam aktivisme Gerakan #MeToo yang merupakan *moral leverage*, dapat diidentifikasi melalui dampak #MeToo yang berhasil menjatuhkan para pelaku pelecehan seksual dari pekerjaannya melalui meningkatnya tuduhan. Dalam beberapa kasus pengunduran diri atau pemecatan orang-orang terkemuka dari pekerjaannya akibat meningkatnya tuduhan dari korban, telah menunjukkan bagaimana “*mobilization of shame*” berlaku dalam kasus ini. Aktor-aktor sasaran yang merupakan pelaku pelecehan seksual telah mengalami pengaruh moral yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan sebagai konsekuensi atas tindakannya.

Dalam survei Bloomberg mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan dan pelanggaran pasca momentum

#MeToo, yang sebagian besar pria termasuk orang-orang terkemuka telah dipecat, mengundurkan diri, atau menghadapi konsekuensi profesional lainnya (Griffin, Recht, & Green, 2018). Pengaruh moral ini telah menunjukkan tingginya prevalensi kasus yang disebabkan tingginya angka orang-orang yang kehilangan pekerjaan sebagai konsekuensi atas tindakannya.

Moral leverage ini juga telah mempengaruhi PBB sebagai organisasi kuat di dunia, bahwa pada tahun 2017 laporan kasus pelecehan seksual terhadap staf internal PBB meningkat di berbagai badan-badan PBB (Bacchi, 2018). Badan-badan terkemuka PBB, termasuk *World Food Program* (WFP) dan UNHCR telah memecat beberapa staf karena laporan pelecehan seksual (Bacchi, 2018). Hal ini telah membuktikan pengaruh moral bagi PBB sendiri untuk melakukan pemecatan terhadap stafnya. PBB merupakan organisasi yang didedikasikan untuk melayani dan melindungi orang lain, sehingga untuk mempertahankan prestise internasional maka adanya pelanggaran internal semacam itu di anggap memalukan bagi organisasi tersebut.

Dengan banyaknya kasus-kasus individual tersebut yang menyangkut pengaruh moral tersebut telah mendorong beberapa pihak untuk menciptakan tindakan kolektif yang menangani masalah ini yang mengarah pada *material leverage*. Taktik politik pengaruh yang merupakan *material leverage*, dapat diidentifikasi dalam kasus ini di mana dampak dari tingginya prevalensi kasus ini menyebabkan aktor-aktor yang memiliki *power* terhadap institusi politik menciptakan sistem hukum yang melindungi para korban. Beberapa institusi telah menciptakan hukum baru dalam rangka menanggapi masalah pelecehan seksual di tempat kerja. *Material leverage* dalam bentuk produk hukum yang dapat

diidentifikasi dalam kasus ini diantaranya; Resolusi yang dikeluarkan ILO sebagai dukungan secara internasional, sedangkan dukungan dalam domestik berupa dikeluarkannya RUU *Be Heard in the Workplace Act*, direformasinya *Congressional Accountability Act of 1995*, dan didirikan dana hukum oleh *Time's Up Legal Defense Fund*.

Dengan diciptakannya sistem hukum baru oleh beberapa aktor tersebut telah menunjukkan bahwa Gerakan *#MeToo* mampu mempengaruhi aktor-aktor kuat dalam hubungan internasional baik negara maupun organisasi internasional secara material. Hukum yang dikeluarkan akan menjadi legitimasi bagi para korban untuk melaporkan dan memastikan mereka terlindungi di bawah peraturan hukum tersebut. Aturan tersebut merupakan pengaruh material bagi para pelaku yang dilaporkan karena secara otomatis mereka pasti akan mendapatkan sanksi baik berupa denda maupun konsekuensi lainnya di bawah produk hukum tersebut.

Dalam hal ini, *material leverage* Gerakan *#MeToo* telah berhasil menarik perhatian dan mendorong tindakan oleh tempat-tempat kelembagaan yang menguntungkan seperti ILO untuk memperkuat legitimasi klaim mereka. Hal ini berhasil dicapai ketika Gerakan *#MeToo* mampu memengaruhi inisiatif organisasi besar yaitu ILO untuk menciptakan standar hukum internasional. Aktivistis harus kritis terhadap efektifitas politik terhadap advokasi mereka tersebut dengan melibatkan aktor kuat dan berpengaruh di dunia (Keck & Sikkink, 1999, p. 97).

Sementara itu, *material leverage* dalam kasus ini juga datang dari organisasi domestik AS sendiri yang berinisiatif memberikan dana hukum bagi para penyintas di berbagai industri untuk melakukan pelaporan. Melalui *Time's Up Legal Defense Fund*, telah memberikan akses bagi masyarakat yang ingin melakukan pelaporan

hukum namun terhambat secara finansial. *Time's Up* merupakan bagian dari mobilisasi dari Gerakan *#MeToo* yang berasal dari kalangan yang bekerja di industri hiburan Hollywood. Dana hukum tersebut telah menjadi *material leverage* yang mendukung para penyintas untuk lebih dekat dengan perlindungan hukum.

Pengaruh material ini juga ditunjukkan oleh sistem hukum Amerika yang mulai memperkenalkan RUU reformasi terhadap hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Pada tanggal 9 April 2019, Kongres AS memperkenalkan H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* ke tahap pertama dari proses legislatif (GovTrack.us, 2019). RUU ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan seksual di dunia pekerjaan (GovTrack.us, 2019). Keseluruhan RUU memiliki lima Judul dengan mengamandemen pada UU ketenagakerjaan sebelumnya pada; *Title VII of the Civil Rights Act of 1964* yang mengatur ketenagakerjaan secara umum; *Government Employee Rights Act of 1991*; *The Congressional Accountability Act of 1995*; dan *The Civil Service Reform Act Of 1978* (GovTrack.us, 2019). Namun, status RUU ini belum melalui proses pada pengesahan UU melalui persetujuan semua majelis dan Presiden AS (GovTrack.us, 2019).

Lembaga Kongres AS sendiri juga telah memperkenalkan RUU untuk mereformasi *Congressional Accountability Act of 1995* pada tanggal 13 Desember 2018 secara terpisah dari yang diajukan di dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* (GovTrack.us, 2018). RUU ini telah disahkan pada tanggal 21 Desember 2018 dalam S.3749 (115TH): *Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act* (GovTrack.us, 2018). UU ini berisi perlindungan terhadap pelecehan seksual khusus bagi karyawan cabang legislatif (GovTrack.us, 2018). Reformasi ini

telah di dorong oleh meningkatnya pelaporan di dalam internal Kongres AS sendiri terhadap kasus pelecehan seksual. Selama tahun 2017-2018, Kongres AS mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018).

Dengan demikian, *material leverage* yang telah diupayakan melalui sistem hukum AS tersebut telah menunjukkan adanya langkah yang di ambil pemerintah AS untuk merespons masalah pelecehan seksual di tempat kerja AS. Namun, secara *material leverage* dalam kasus ini belum mencapai hasil maksimal di mana keseluruhan sistem hukum yang dikeluarkan belum diberlakukan secara resmi karena belum berhasil disahkan. Meskipun Kongres telah berhasil mengesahkan UU yang mereformasi hukum pelecehan seksualnya secara internal, hal ini belum dapat mewakili masyarakat secara umum karena UU tersebut hanya berlaku bagi politisi Kongres.

3.1.4. *Accountability Politics*

Politik Akuntabilitas menjadi taktik yang dapat digunakan jaringan ketika aktor target yakni pemerintah telah memberi komitmen untuk merubah perilaku negara atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dengan hal itu, jaringan memiliki peluang politik akuntabilitas yakni dapat mendapatkan posisi untuk mengamati antara wacana dan praktik dari komitmen tersebut sebagai komando informasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Taktik ini bertujuan agar implementasi dari perubahan hukum berjalan sesuai dengan komitmen, dimana seringkali pemerintah membuat komitmen perubahan hanya untuk mengalihkan jaringan dan perhatian publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Jaringan

akan berupaya mengawasi komitmen tersebut untuk mencegah penyimpangan aktor target (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dalam hal ini, Gerakan #MeToo AS belum dapat memiliki peluang politik akuntabilitas, di mana hukum pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri belum resmi ditandatangani oleh pemerintah dan masih dalam bentuk RUU.

Dari serangkaian taktik yang tersebut telah menunjukkan bagaimana upaya Gerakan #MeToo dalam mencapai tujuannya. Bagian ini telah menganalisa aktivisme gerakan melalui tipologi taktik dalam teori TAN yang dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 1. Taktik Gerakan #MeToo AS berdasarkan tipologi taktik dalam teori *Transnational Advocacy Network*

Taktik Jaringan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
<i>Information Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> Peran sentral media baik nasional dan internasional serta keaktifan gerakan dalam membagikan informasi telah mendorong perluasan mobilisasi gerakan. Aktivis inti Gerakan #MeToo aktif membagikan informasi melalui <i>website</i> sebagai sumber informasi perkembangan gerakan.
<i>Symbolic Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> Tagar #MeToo sebagai klaim atas masalah pelecehan seksual Melalui acara <i>Golden Globe Awards</i> di mana dengan menunjukkan pakaian serba hitam

			<p>dan pin <i>Time's Up</i> yang dipahami sebagai solidaritas terhadap masalah pelecehan seksual di dalam negeri melalui penyediaan dana hukum.</p>
<i>Leverage Politics</i>	✓		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Moral leverage</i> dapat diidentifikasi melalui dampak #<i>MeToo</i> yang berhasil menjatuhkan para pelaku pelecehan seksual dari pekerjaannya melalui meningkatnya tuduhan. • <i>Material Leverage</i> dalam bentuk produk hukum yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini diantaranya; Resolusi yang dikeluarkan ILO sebagai dukungan secara internasional, sedangkan dukungan dalam domestik berupa dikeluarkannya RUU <i>Be Heard in the Workplace Act</i>, direformasinya <i>Congressional Accountability Act of 1995</i>, dan didirikan dana hukum oleh <i>Time's Up Legal Defense Fund</i>.
<i>Accountability Politics</i>		✓	<p>Gerakan #<i>MeToo</i> AS belum memiliki peluang politik akuntabilitas di mana reformasi terhadap hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja belum disahkan menjadi Undang-undang.</p>

Sumber: Diolah melalui Tipologi Taktik dalam Keck & Sikkink (1999)

3.2. Hasil Pencapaian Gerakan #MeToo AS dalam Memengaruhi Kebijakan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja AS

Dalam menilai pencapaian jaringan advokasi, Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda. *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional. *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan. *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam ‘aktor target’ yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta. *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara.

Setelah melalui berbagai taktik-taktik diatas baik secara domestik maupun dukungan internasional, pencapaian Gerakan #MeToo AS akan di analisa melalui jenis tahapan pengaruh menurut Keck & Sikkink. Pada tahap pertama, jaringan menghasilkan perhatian pada masalah baru dan membantu mengatur agenda ketika mereka memprovokasi perhatian media, debat, audiensi, dan pertemuan tentang isu-isu yang sebelumnya bukan masalah debat publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Latar belakang Gerakan #MeToo terbentuk melalui aktor domestik yang memprovokasi perhatian media melalui masalah pelecehan seksual di tempat kerja yang membingkainya melalui membagi cerita pengalamannya. Kesuksesan momentum #MeToo menjadi perhatian internasional telah menunjukkan bahwa tahapan pertama ini telah berhasil dicapai oleh Gerakan #MeToo.

Setelah jaringan dapat memengaruhi perhatian publik, maka tahapan kedua adalah upaya dalam memengaruhi posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam mempengaruhi posisi

diskursif, jaringan akan membujuk negara dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap apa yang diadvokasikan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Peran Gerakan *#MeToo* dalam memengaruhi kesadaran organisasi besar berupa ILO yang menghasilkan deklarasi internasional telah menjelaskan pencapaian Gerakan *#MeToo* pada tahap kedua ini.

Penetapan standar ILO melalui Konvensi No.190 Tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja telah menunjukkan pengaruh posisi diskursif oleh Gerakan *#MeToo* berhasil dicapai. Sementara, dalam ranah domestik AS, pengaruh dalam mengubah posisi kebijakan domestik dapat diidentifikasi melalui dikeluarkannya RUU yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* (GovTrack.us, 2019).

Dalam RUU tersebut telah memasukkan beberapa amandemen diantaranya yang paling penting adalah *Title VII Civil Rights Act of 1964* yang merupakan perlindungan luas di seluruh tempat kerja AS (GovTrack.us, 2019). Didalamnya juga termasuk tagihan amandemen *Employee Rights Act of 1991*; *The Congressional Accountability Act of 1995*; dan *The Civil Service Reform Act Of 1978* (GovTrack.us, 2019). Langkah pemerintah AS dalam mereformasi undang-undangnya tersebut menjadi pencapaian Gerakan *#MeToo* AS dalam memengaruhi posisi kebijakan domestik negaranya.

Selanjutnya pada tahap ketiga adalah pengaruh pada prosedur kelembagaan. Dalam mencapai tahap pengaruh ini, jaringan berupaya menekan negara-negara bagian untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Pada tahap ini, aktivisme

Gerakan #MeToo diidentifikasi belum dapat mencapai pengaruh ini. Meskipun Gerakan #MeToo telah berhasil mendorong ILO untuk bertindak dalam mengeluarkan komitmen yang mengikat melalui konvensi, pengaruh prosedur kelembagaan belum berlaku. Negara-negara yang menjadi anggota ILO belum ada yang meratifikasi Konvensi No.190 Tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja tersebut. Sedangkan konvensi baru akan mulai berlaku dalam dua belas bulan setelah minimal dua Negara anggota meratifikasinya (ILO, 2019). Sehingga pemberlakuan terhadap penetapan ILO tersebut belum dilaksanakan.

Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi konvensi tersebut meskipun dalam pemungutan suara telah menyetujui adopsi konvensi tersebut. Sementara, dalam ranah domestik AS sendiri, RUU yang diperkenalkan untuk mereformasi pelecehan seksual di tempat kerja dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act* belum disahkan menjadi undang-undang (GovTrack.us, 2019). Sehingga tahap pencapaian Gerakan #MeToo belum mencapai pada tahapan pengaruh ini.

Dengan demikian, pengaruh pada tahapan keempat dan kelima belum dapat dicapai apabila tahapan sebelumnya belum terselesaikan. Pada tahapan keempat yang berupa pengaruh pada kebijakan aktor target baik negara maupun organisasi internasional dapat dicapai apabila gerakan telah mencapai pengaruh prosedur kelembagaan. Sedangkan pengaruh kelima yang berupa pengaruh pada perilaku negara mengarah pada penerapan dari kebijakan apabila telah disahkan secara resmi sebagai bentuk implementasi. Pencapaian Gerakan #MeToo AS dalam memengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di Amerika Serikat

yang telah diukur melalui tahapan pengaruh oleh Keck & Sikkink ini menghasilkan jawaban pada tahapan kedua.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Mobilisasi Gerakan #MeToo di Amerika Serikat telah memberikan dampak secara politik di negara tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisa pencapaian Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di AS pada tahun 2017-2019. Dalam menganalisa dampak gerakan tersebut, penelitian menggunakan teori “*Transnational Advocacy Network*” yang akan membahas mengenai faktor kemunculan aktivisme transnasional gerakan, taktik gerakan, serta pada bagian akhir akan menjelaskan hasil pencapaian gerakan yang diukur berdasarkan teori ini.

Pola bumerang telah menjadi faktor dalam proses pembentukan jaringan advokasi transnasional Gerakan #MeToo. Diikuti oleh dua faktor lainnya yakni; adanya *political entrepreneurs* sebagai aktor pelaku jaringan dan aktif dalam melanjutkan upaya advokasi, dan tersedianya dukungan organisasi internasional ILO, dimana kedua faktor ini telah berkontribusi di dalam penjelasan ‘*boomerang pattern*’. Di sisi lain, dalam menganalisa upaya Gerakan #MeToo AS dalam mengejar tujuannya yakni mendorong tuntutan reformasi legislatif negaranya dapat diidentifikasi melalui tipologi taktik oleh Keck & Sikkink yakni *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Leverage Politics*.

Dalam taktik politik informasi, sebagian besar aktivisme mendapatkan keuntungan dari dukungan media baik media nasional AS maupun media internasional yang memperluas isu melalui publikasinya. Sedangkan politik simbolik melalui tagar #MeToo sebagai klaim atas masalah pelecehan seksual serta acara *Golden Globe Awards* di mana dengan menunjukkan pakaian serba hitam dan pin *Time’s Up* yang dipahami sebagai solidaritas terhadap masalah

pelecehan seksual di dalam negeri melalui penyediaan dana hukum. Terakhir melalui taktik politik pengaruh yang diidentifikasi melalui *leverage politics* berupa *moral leverage* dan *material leverage*. *Moral leverage* dapat diidentifikasi melalui dampak #MeToo yang berhasil menjatuhkan para pelaku pelecehan seksual dari pekerjaannya melalui meningkatnya tuduhan. Sementara *material leverage* dalam bentuk produk hukum yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini diantaranya; Resolusi yang dikeluarkan ILO sebagai dukungan secara internasional, sedangkan dukungan dalam domestik berupa dikeluarkannya RUU *Be Heard in the Workplace Act*, direformasinya *Congressional Accountability Act of 1995*, dan didirikan dana hukum oleh *Time's Up Legal Defense Fund*. Taktik *accountability politics* tidak berlaku disini dimana hukum yang dikeluarkan belum dapat diberlakukan secara resmi.

Berdasarkan taktik-taktik yang telah diidentifikasi melalui aktivisme Gerakan #MeToo AS tersebut telah membawa penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi pencapaian gerakan. Dalam menganalisa pengaruh Gerakan #MeToo berdasarkan hasil yang diidentifikasi melalui jenis tahapan Keck & Sikkink, pencapaian gerakan saat ini berada pada tahap kedua. Gerakan telah mempengaruhi posisi diskursif negara melalui dikeluarkannya RUU yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja dalam H.R 2148: *Be Heard in the Workplace Act*. Sedangkan pengaruh diskursif pada organisasi internasional dapat dilihat dari keberhasilan Gerakan #MeToo dalam memengaruhi ILO untuk mengeluarkan komitmen mengikat bagi negara-negara anggotanya dalam rangka penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Keseluruhan bab dalam skripsi ini telah menganalisa aktivisme Gerakan #MeToo AS melalui teori *Transnational Advocacy Network*. Pengaruh Gerakan #MeToo AS terhadap perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di negaranya dalam kasus ini dinilai belum berhasil. Namun dengan upaya responsif pemerintah AS dalam mengeluarkan RUU reformasi tersebut telah menunjukkan sinyal adanya langkah perubahan perilaku negara terhadap

masalah yang diadvokasikan Gerakan *#MeToo*. Klaim gerakan yang telah beresonansi secara global telah membuat pemerintahnya rentan terhadap klaim tersebut. Hal ini berhasil mendorong pemerintah AS untuk mulai merespons masalah yang diadvokasikan oleh Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa pencapaian Gerakan *#MeToo* dalam memengaruhi perubahan kebijakan AS terhadap Hukum pelecehan seksual di AS belum mencapai pada tahap akhir untuk dikatakan berhasil. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian ini agar penelitian-penelitian selanjutnya membahas mengenai bagaimana keberlanjutan Gerakan *#MeToo* dalam mengejar tahapan selanjutnya setelah RUU mengenai hukum pelecehan seksual di AS dan Resolusi PBB telah berhasil diberlakukan. Hal ini tentunya akan menarik untuk melihat hasil akhir dari pencapaian Gerakan *#MeToo* dalam memengaruhi perubahan politik internasional melalui adanya perubahan hukum yang didorong oleh gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aday, S., & Livingston, S. (2008). Taking the state out of state–media relations theory: how transnational advocacy networks are changing the press–state dynamic. *Media, War & Conflict Article*, 99-107.
- Bacchi, U. (2018, Januari 31). *U.N. agencies vow to ramp up fight against sexual harassment*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-global-un-harassment/u-n-agencies-vow-to-ramp-up-fight-against-sexual-harassment-idUSKBN1FK1YY>
- Beitsch, R. (2018, July 31). *#MeToo Has Changed Our Culture. Now It's Changing Our Laws*. Retrieved from PEW: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2018/07/31/metoo-has-changed-our-culture-now-its-changing-our-laws>
- Burke, L. (2018, Maret 9). *The #MeToo shockwave: how the movement has reverberated around the world*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/world/metoo-shockwave/>
- Burke, T., & Milano, A. (2017, December 21). *We created the #MeToo movement. Now it's time for #HerToo*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/dec/21/we-created-the-metoo-movement-now-its-time-for-hertoo>
- Buxton, M. (2018, April 19). *With Me Too Rising, Google Maps The Spread Of A Movement*. Retrieved from REFINERY29: <https://www.refinery29.com/en-us/2018/04/196748/me-too-google>
- Cadei, E. (2017, Oktober 25). *Few in Washington are saying #MeToo. California congresswoman wants to change that*. Retrieved from McClatchy DC Bureau: <https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/congress/article180767631.html>
- Carlsen, A., Salam, M., Miller, C. C., Lu, D., Ngu, A., Patel, J. K., . . . Zach. (2018). *#MeToo Brought Down 201 Powerful Men. Nearly Half of Their Replacements Are Women*. New York : The New York Times .
- Chatterjee, R. (2018, Februari 21). *A New Survey Finds 81 Percent Of Women Have Experienced Sexual Harassment*. Retrieved from National Public Radio : <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-survey-finds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment>
- EEOC. (2019, Juli 17). *Title VII of the Civil Rights Act of 1964*. Retrieved from U.S. Equal Employment Opportunity Commission: <https://www.eeoc.gov/laws/statutes/titlevii.cfm>
- Ennis, E., & Wolfe, L. (2018). *#MeToo: THE WOMEN'S MEDIA CENTER REPORT*. United States: The Women's Media Center .
- Garcia, S. E. (2017, October 20). *The Woman Who Created #MeToo Long Before Hashtags*. Retrieved from The New York Times : <https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html>
- Godfrey, E., Felton, L., & Hosking, T. (2018, Juli 26). *The 25 Candidates for 2018 Sunk by #MeToo Allegations*. Retrieved from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/07/the-25-candidates-for-2018-sunk-by-metoo-allegations/565457/>

- GovTrack.us. (2018, Desember 21). *S. 3749 - 115th Congress: Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act* . Retrieved from govtrack: [govtrack.us/congress/bills/115/s3749](https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s3749)
- GovTrack.us. (2019, April 9). *H.R. 2148 - 116th Congress: BE HEARD in the Workplace Act*. Retrieved from govtrack: [govtrack.us/congress/bills/116/hr2148](https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr2148)
- Griffin, R., Recht, H., & Green, J. (2018, Oktober 5). *#MeToo : One Year Later* . Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/graphics/2018-me-too-anniversary/>
- Hart, C. G. (2019). The Penalties For Self-Reporting Sexual Harassment. *Gender and Society*, 534–559.
- ILC. (2019). Final record vote on the adoption of the Convention concening the elimination of violence and harassment in the world of work. *ILO Centenary Declaration* (p. 2). Geneva: International Labour Organization.
- ILC. (2019). Final record vote on the adoption of the Recommendation concening the elimination of violence and harassment in the world of work. *ILO Centenary Declaration* (pp. 2-5). Geneva: International Labour Organization.
- ILC. (2019). Resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. *The General Conference of the International Labour Organization, meeting at its 108th (Centenary) Session* (p. 1). Geneva: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.
- ILO. (2019, Juni 21). *108th International Labour Conference: .* Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm
- ILO. (2019). FINAL LIST OF DELEGATIONS: International Labour Conference 108th Session. *ILO Centenary Declaration* (pp. 47-48). Geneva: International Labour Organization.
- ILO. (2019, April 3). *Standard-Setting Committee: Violence and harassment in the world of work - Background information*. Retrieved from 108th Session of the International Labour Conference: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_681754/lang--en/index.htm
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International social science journal*, 89-101.
- King, K. (2017, October 18). *What It Means When Women Say "Me Too"*. Retrieved from BuzzFeed: <https://www.buzzfeed.com/kirstenking/what-it-means-when-women-say-me-too>
- Koonce, S. (2019, Februari 5). *#MeToo: Sexual Harassment in the Courtroom*. Retrieved April 12, 2019, from American Bar Association: https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/appellate_issues/2019/winter/metoo-sexual-harassment-in-the-courtroom/
- Lakritz, T. (2018, Oktober 1). *These 15 women opened up about their sexual assault experiences thanks to the #metoo campaign*. Retrieved from Insider: <https://www.insider.com/me-too-hashtag-sexual-harassment-assault-2017-11>
- Langone, A. (2018, Maret 22). *#MeToo and Time's Up Founders Explain the Difference Between the 2 Movements And How They're Alike*. Retrieved from Time: <https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements/>
- MacKinnon, C. A. (2019, Maret 24). *Where #MeToo Came From, and Where It's Going: The movement is moving the culture beneath the law of sexual abuse*. Retrieved from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/203/catharine-mackinnon-what-metoo-has-changed/585313/019/>

- MeToo Movement. (2019, September 7). *Advocacy Resource Library*. Retrieved from metoo.: <https://metoomvmt.org/about/#history>
- Milano, A. (2018, November 15). Retrieved from Twitter: https://twitter.com/Alyssa_Milano
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. . (2018). Chapter: 5 Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment. In E. a. National Academies of Sciences, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine* (pp. 93-292). Washington, DC: The National Academies Press.
- National Conference of State Legislatures . (2018). *2018 Legislation Related to Sexual Harassment in the Legislature*. Colorado: The National Conference of State Legislatures .
- NWLC. (2018, Desember 13). *Congress Passes Bill to Reform Its Sexual Harassment Procedures*. Retrieved from National Women's Law Center: <https://nwlc.org/press-releases/congress-passes-bill-to-reform-its-sexual-harassment-procedures/>
- Ohlheiser, A. (2017, October 19). *The woman behind 'Me Too' knew the power of the phrase when she created it 10 years ago*. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/10/19/the-woman-behind-me-too-knew-the-power-of-the-phrase-when-she-created-it-10-years-ago/?noredirect=on&utm_term=.9c0d0728b73c
- Reuters, N. Y. (2018, Juni 26). *US among 10 most dangerous countries for women amid #MeToo campaign: Poll*. Retrieved from The Straits Times: <https://www.straitstimes.com/world/us-among-10-most-dangerous-countries-for-women-amid-metoo-campaign-poll>
- Safronova, V. (2018, Januari 7). *Time's Up Pins Are the Political Accessory at the Golden Globes*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/01/07/fashion/times-up-pins-golden-globes-2018.html>
- Seales, R. (2018). *What has #MeToo actually changed? US* : BBC News.
- Siegel, R. B. (2003). Introduction: A Short History of Sexual Harassment. In C. A. Mackinnon, & R. B. Siegel, *Directions in Sexual Harassment Law\$ Users Without A Subscription Are Not Able To See The Full Content. Directions in Sexual Harassment Law* (pp. 1-39). New Haven, USA: Yale University Press Scholarship.
- Soetjipto, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara Dalam Hubungan Internasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stone, M., & Vogelstein, R. (2019, Maret 7). *International Women's Day: Celebrating #MeToo's Global Impact* . Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2019/03/07/metooglobalimpactinternationalwomens-day/>
- The Straits Time. (2018). *US advertising firms grapple with 'Me Too', industry officials say they are rethinking workplace policies*. New York: The Straits Time .
- Time's Up. (2019, Agustus 8). *About Time's Up* . Retrieved from Time's Up : https://www.timesupnow.com/about_times_up
- Vogelstein, R. B. (2018, April 9). *Women This Week: #MeToo at the UN*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/blog/women-week-metoo-un>
- Walters, J. (2018, Oktober 21). *#MeToo a revolution that can't be stopped, says Time's Up co-founder*. Retrieved from The Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/21/metoo-revolution-times-up-roberta-kaplan>
- Weldon, S. L. (2006). Women's Movements, Identity Politics, and Policy Impacts: A Study of Policies on Violence against Women in the 50 United States. *Political Research Quarterly* , 111-122.

- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Zhou, L. (2018, December 20). *Congress's recently passed sexual harassment bill, explained*. Retrieved from Vox: <https://www.vox.com/2018/12/20/18138377/congress-sexual-harassment-bill>
- Zippel, K. (2004). Transnational Advocacy Networks and Policy Cycles in the European Union: The Case of Sexual Harrashment. *Social Politics* , 57-85.
- Zippel, K. (2006). Equality through litigation: sexual harassment in the United States. In K. Zippel, *The Politics od Sexual Harassment: A Comparative Study of the United States, the European Union, and Germany* (pp. 42-81). Cambridge: Cambridge University Press.

